

**PERLINDUNGAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM  
AKIBAT PENELANTARAN OLEH ORANG TUA  
(Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana  
Hukum Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan  
pada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar

**ALAUDDIN**  
MAKASSAR

**JUSNAIDAR**  
**NIM: 10200114125**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2019**

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jusnaidar  
NIM : 10200114125  
Tempat/Tgl. Lahir : Enrekang, 25 November 1995  
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar  
Judul : Perlindungan Anak yang Berkonflik dengan Hukum Akibat  
Penelantaran Oleh Orang Tua (Perspektif Hukum Positif dan  
Hukum Islam).

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar bahwa hasil karya penyusunan sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat atau dibantu orang lain secara keseluruhan (tanpa campur tangan penyusun) maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**ALAUDDIN**  
MAKASSARA

Makassar, 27 November 2018

Penulis,



Jusnaidar  
Nim: 10200114115

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **JUSNAIDAR, NIM: 10200114125**, mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, *“Perlindungan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Akibat Penelantaran Oleh Orang Tua (Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam)”*.

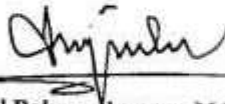
Memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang ujian hasil.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Pembimbing I

Makassar, 5 Januari 2019

Pembimbing II



Abdul Rahman Kanang, M.Pd., Ph.D.  
Nip. 19731231 200501 1 034



Hj. Rahmiati, M. Pd.  
Nip. 19771005 200901 2 005

UIN ALAUDDIN  
MAKASSAR

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Perlindungan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Akibat Penelantaran Oleh Orang Tua (Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam)” yang disusun oleh saudara(i) **Jusnaidar, NIM: 10200114125**, mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 27 Februari 2019 M, bertepatan 22 Jumadil Akhir 1440 H dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar dengan beberapa perbaikan.

Samata, 28 Februari 2019 M

23 Jumadil Akhir 1440 H

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Dra. Nila sasirawati, M.Si	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Dudung Abdullah, M.Ag	(.....)
Munaqisy II	: Awaliah Musgamy, S.Ag, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Abd. Rahman Kanang, M.Pd, Ph.D	(.....)
Pembimbing II	: Hj. Rahmiati, S.Pd., M.Pd	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. Darussalam, M.Ag

Nip: 19621016 199003 1 003

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pujisyukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah atas berkatrahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul: **“Perlindungan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Akibat Penelantaran Oleh Orang Tua (Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam)”** ini untuk memenuhi suatu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Shalawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw. karena dialah yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun Alhamdulillah berkat bantuan, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak serta berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala tersebut dapat teratasi.

Untuk itu perkenankanlah penulis mengucapkan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya terlebih kepada ayahanda tercinta Udin Sanaria (Alm) dan Ibunda yang aku sayangi Ernawati, yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayangnya serta perhatiannya. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Pengharagaan dan terimakasih penulis berikan kepada pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini terutama kepada:



1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kebijakan-kebijakan demi membangun UIN Alauddin Makassar agar lebih berkualitas dan dapat bersaing dengan perguruan tinggi lain.
2. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar beserta jajarannya.
3. Ibu Dra. Nila Sastrawati, M.Si. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan UIN Alauddin Makassar beserta Ibu Dr. Kurniati, M.H.I. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan.
4. Bapak Abd. Rahman Kanang, M.Pd., Ph.D. selaku pembimbing I dan Hj. Rahmiati, S.Pd., M.Pd. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, kesabaran, ketulusan, saran dan mengarahkan penulis dalam perampungan penulis skripsi ini.
5. Bapak Dr. Dudung Abdullah, M.Ag. dan Ibu Awaliah Musgamy, S.Ag., M.Ag. selaku Penguji I dan penguji II, yang telah banyak membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan dan staf pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Makassar untuk semua ilmu dan juga bantuannya yang telah diberikan kepada penulis.
7. Kepala perpustakaan UIN Alauddin Makassar beserta stafnya yang telah banyak membantu dan memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya selama proses perkuliahan.
8. Seluruh Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Teman-teman Angkatan Kontetusa HPK 2014, dan

khususnya HPK C atas kebersamaannya selama ini, karena kalian penulis mendapatkan pengalaman yang sangat berarti dan berharga selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

9. Terima kasih kepada Sahabatku Anna Mutmainnah Murdi., S.Farm, Ardawanti S,Kep., Misrianti S.Ip. sekaligus teman seperjuangan selama penyusunan skripsi (Hastuti, Reski Sri Rahayu, Annisa Rezki, NurAfia, Endang, Amriani) yang takhenti-hentinya memberikan support kepada penulis selama penyusunan skripsi ini. Dan para pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu sekali lagi penulis ucapkan Jazakumullahu khairan Khatsiira atas perhatian dan do'anya yang diberikan kepada penulis.
10. Dan terkhusus saudara kandung (Jumadil Awal, dan Ramadhan Udin S. Ak) yang telah banyak membantu, menyemangati, mendo'akan selama penyusunan skripsi ini dan saya ucapkan banyak terima kasih.
11. Kepada teman seperjuangan KKN Angkatan 58 Kabupaten, Polongbangkeng Utara, yang tak henti-hentinya memberikan semangat dan do'a dengan kelancaran penulisan skripsi ini, semoga Allah membalas kebaikan kalian.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran atau kritikan dari pembaca untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata penulis persembahkan karya ini dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Allahumma Aamiin.

Makassar, Januari 2019  
Penulis,

**Jusnaidar**  
**Nim:10200114125**

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup penelitian .....	5
D. Kajian Pustaka .....	6
E. Metodologi Penelitian.....	9
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	12
<b>BAB II KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM.....</b>	<b>14</b>
A. Konsepsi Anak.....	14
1. Definisi Anak .....	14
2. Anak Berkonflik Dengan Hukum .....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Penelantaran Anak.....	17
1. Definisi Penelantaran .....	17
2. Pengertian Anak Terlantar .....	18
3. Dampak Penelantaran Anak.....	19



4. Bentuk Penelantaran Anak.....	21
C. Tinjauan Umum Tentang Hak-Hak Anak.....	21
1. Hak-Hak Anak .....	23
2. Prinsip-prinsip Perlindungan Anak.....	24
<b>BAB III PERLINDUNGAN ANAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA</b>	<b>32</b>
A. Kebijakan Perlindungan Anak.....	32
1. Pengertian Perlindungan Anak.....	35
2. Tanggung jawab Perlindungan Anak.....	42
3. Hukum Perlindungan Anak.....	44
B. Kewajiban Orangtua Terhadap Anak Menurut Hukum Nasional ...	48
<b>BAB IV PERLINDUNGAN ANAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 DAN HUKUM ISLAM.....</b>	<b>49</b>
A. Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Akibat Penelantaran Orang Tua Menurut Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak .....	49
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Konsep Perlindungan Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Akibat Penelantaran Orang Tua ....	58
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Implikasi Penelitian .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik

غ	gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>fathah</i>	a	a
إ	<i>kasrah</i>	i	i
أ	<i>damamah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ئِ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	ai	a dan i
ؤ	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: *kaifa*

هَوَّلَ: *hauḷa*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ ...   إ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ: *māta*

رَمَى: *ramā*

قِيلَ: *qīla*

يَمُوتُ : yamūtu

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعْمَ : *nu‘ima*

عَدُوٌّ : *aduwwun*

Jika huruf ع ber-*tasydīd* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ِ ) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٍّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٍّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

#### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِّرْتُ : *umirtu*



#### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī Zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

#### 9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

بِالله dīnullāh billāh

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ hum fī raḥmatillāh

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf

kapital berdasarkan pedoman Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*  
*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkatamubārakan*  
*Syahrū Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān*  
*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī*  
*Abū Naṣr al-Farābī*  
*Al-Gazālī*  
*Al-Munqiz min al-Ḍalāl*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-

Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr

Ḥāmid Abū)

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat



## ABSTRAK

**Nama : Jusnaidar**

**NIM : 10200114125**

**Judul : Perlindungan Anak yang Berkonflik dengan Hukum Akibat Penelantaran Oleh Orang tua (Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam)**

---

Penelitian ini berfokus pada perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum akibat penelantaran oleh orang tua dengan pokok masalah adalah 1) Bagaimana konsep perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum akibat penelantaran orang tua menurut undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak?. 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap konsep perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum akibat penelantaran orang tua?

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) yang dalam penelitian hukum disebut penelitian normatif (*doctrinal*), dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian normatif hanya menggunakan data sekunder yang terdiri dari sumber hukum primer dan hukum sekunder. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan cara membaca literatur-literatur yang mempunyai keterkaitan dan membangun penelitian ini. Hasil penelitian kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Konsep perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum akibat penelantaran orang tua menurut undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, berawal dari sikap tak acuh orang tua menyebabkan keterlantaran, jika hal tersebut terjadi terus menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik untuk seluruh pihak, perilaku tersebut akan tetap terjadi pada anak-anak yang lain dan akan berdampak besar sehingga menyebabkan guncangan dan konflik batin terhadap diri anak. Hal tersebut dapat berdampak dan memberi pengaruh besar serta menghambat perkembangan fisik, mental, emosional juga sosial anak pada masa yang akan datang. Anak semestinya dilindungi supaya terhindar dari berbagai macam perilaku kejahatan, misalnya perilaku penelantaran yang dilakukan oleh orang tuanya, dan mengupayakan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sebagai penerus cita-cita bangsa. 2) Pandangan Hukum Islam terhadap konsep perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum akibat penelantaran orang tua, dalam hal ini bentuk perilaku penelantaran anak apapun alasannya dalam Hukum Islam tidak pernah dibenarkan sebab para pelaku penelantaran anak baik yang disengaja atau tidak disengaja, mereka telah menyangkal hak-hak anak tersebut.

Implikasi penelitian ini adalah: 1) Penelitian ini diharapkan agar dapat memahami dan menyebarluaskan maksud dan pemikiran tentang keadilan, hak dan kewajiban, kepentingan pribadi, kepentingan umum dan maksud lainnya yang baik yang memiliki hubungan dengan pelaksanaan perlindungan anak dengan cara melakukan sosialisasi kemasyarakatan. 2) Penelitian ini diharapkan agar semua warga masyarakat terutama orang tua meningkatkan pemahaman dan kesadaran pada hak-hak anak dan perlindungan anak dan juga perlu mengetahui bahwasanya kekerasan pada anak tidak hanya terjadi pada anak yang teraniaya secara fisik, tapi juga termasuk pengertian kekerasan pada anak sangat luas.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak merupakan amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga, dipelihara, serta didik karena didalamnya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak merupakan generasi serta harapan bagi orangtua, bangsa dan negara. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>1</sup>

Sebagai penerus bangsa yang belum memiliki kematangan dalam berpikir, anak masih membutuhkan perlindungan dan pengawasan yang khusus dari orangtuanya. Perlindungan khusus kepada seorang anak berbeda dengan orang dewasa, dikarenakan alasan fisik dan mental yang belum matang. Oleh karena itu perlindungan yang diberikan orang tua merupakan pondasi utama bagi keberhasilan masa depan anak.

Selain orang tua negara pun menjamin perlindungan dan masa depan terhadap anak, yang kemudian dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28 B ayat 2 yang berbunyi “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>2</sup> Dalam Hukum Syariah Islam diperintahkan untuk mendidik anak dengan cara yang baik dan sabar agar mereka mengenal dan mencintai Allah SWT, yang menciptakannya dan seluruh alam semesta. Hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah SWT QS Luqman 31/13 yang berbunyi:

---

<sup>1</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Angka 1.

<sup>2</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 B Ayat (2).

وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِبَنِيهِ ۖ وَهُوَ يَعِظُهُ ۚ يَبْنَىٰ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّ الشِّرْكَ  
لُظْلُمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

Terjemahnya:

“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".<sup>3</sup>

Kondisi sosial ekonomi keluarga dan keberadaan anak serta berbagai faktor lain pada saat ini membawa sebagian anak berada dalam situasi sulit dan rawan. Keadaan tersebut menjadikan anak kehilangan masa kanak-kanak dan bahkan menjemurkan mereka ke dalam tindakan-tindakan kenakalan, pelanggaran hukum hingga kriminalitas. Bambang Waluyo mengatakan bahwa “mengungkapkan bahwa sebagai pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan budaya dan perkembangan pembangunan pada umumnya bukan hanya orang dewasa, tetapi anak-anak juga terjebak melanggar norma terutama norma hukum.

Anak-anak terjebak dalam pola konsumerisme dan asosial yang semakin lama dapat menjurus ke tindakan kriminal, seperti narkoba, pemerasan, pencurian, dan penganiayaan pemerkosaan, dan sebagainya. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang tidak disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian biasa disebut masyarakat sebagai suatu pelanggaran dan bahkan suatu kejahatan.

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh manusia, masyarakat dan bahkan negara. Kenyataannya telah

---

<sup>3</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 412.



membuktikan bahwa bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit diberantas tuntas. Kejahatan yang kemudian dilakukan oleh anak biasanya terjadi karena beberapa faktor yaitu kurangnya kasih sayang, asuhan, bimbingan, dan pembinaan dalam pengembangan sikap perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orangtua asuh.

Hal ini akan menyebabkan anak mudah terjerumus dan terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya. Perhatian terhadap masalah kenakalan anak ini telah banyak menuangkan berbagai pemikiran, baik dalam bentuk diskusi, maupun di dalam seminar yang telah diadakan oleh instansi atau lembaga pemerintahan. Penelantaran terhadap anakpun merupakan salah satu faktor yang menyebabkan seorang anak dapat dengan mudahnya melakukan pelanggaran terhadap hukum.

Anak terlantar sendiri pada umumnya merupakan anak-anak yang berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda. Ada yang berasal dari keluarga yang tidak mampu, sehingga mereka tumbuh dan berkembang dengan latar belakang kehidupan jalanan yang akrab dengan kemiskinan, penganiayaan, dan hilangnya kasih sayang, sehingga membuat moral/perilakunya negatif. Penelantaran kepada anak merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dan tindakan kekerasan yang dialami oleh anak dan ini merupakan pelanggaran HAM terhadap anak. Namun, saat ini masih banyak orang tua yang membiarkan anaknya yang masih dibawah umur terlantar.

Dampak dari penelantaran pada anak sangat beragam dan memerlukan penanganan yang tepat sebelum anak meniru perilaku orangtua yang menelantarkannya tersebut ke anaknya sendiri. Karena menurut beberapa penelitian, banyak orang tua yang menelantarkan anaknya sendiri juga mengalami hal serupa

saat kecil. Sehingga penanganan yang sesuai akan memutuskan rantai kekerasan dan penelantaran pada anak kedepannya.

Namun, faktor-faktor penelantaran tidak hanya berasal dari masalah orang tua sendiri, tapi juga ada pengaruh dari luar yang menyebabkan orangtua tega menelantarkan anaknya sendiri. Baik dari faktor lingkungan, gaya hidup, dan ekonominya. Semua masalah pada orang tua yang tidak dapat terselesaikan dengan baik, dapat memicu kemarahan atau ketidak nyamanan dalam hidup, hingga melampiaskannya pada anak. Padahal, anak tidak mengetahui apapun permasalahan yang dihadapi orangtuanya.

Disinilah dibutuhkan dukungan dari semua pihak, agar anak yang sebagai korban penelantaran dan juga orangtua sebagai pelaku, dapat kembali kekehidupan normal yang penuh kasih sayang, dan tidak berlanjut ke generasi selanjutnya. Di samping perlindungan dari pemerintah, hal yang tidak kalah pentingnya adalah peran orang tua dan masyarakat dalam membentuk mental dan moral anak.

Bimbingan dari orang tua dan dukungan dari lingkungan masyarakat untuk mengenalkan perbuatan baik dan perbuatan buruk/menyimpang serta akibat setiap perbuatan tersebut kepada anak diharapkan dapat membentuk mental dan moral anak menjadi lebih baik sehingga anak mampu menjaga dirinya dari pengaruh-pengaruh negatif lingkungan yang mungkin membentuk perilaku yang buruk pada diri anak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam sebuah penulisan skripsi dengan judul: ***“Perlindungan Anak yang Berkonflik dengan Hukum Akibat Penelantaran oleh Orang tua (Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam)”***.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diterangkan tadi, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan analisis ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum akibat penelantaran orang tua menurut undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap konsep perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum akibat penelantaran orang tua?

## **C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Penelitian**

Agar uraian dalam skripsi ini lebih jelas dan terarah makna kata yang dimaksud dalam judul, maka dijelaskan beberapa kata pada judul yang dapat mengandung makna lain dan menimbulkan pemahaman yang keliru dari pembaca.

1. *Anak* adalah seorang laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. *Anak* adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.<sup>4</sup> *Anak* adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara.<sup>5</sup>
2. *Anak berkonflik dengan hukum* adalah anak yang melakukan kenakalan, yang kemudian akan disebut sebagai kenakalan anak, yaitu kejahatan pada umumnya dan perilaku anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan kejahatan pada khususnya. Kata konflik digunakan untuk menunjukkan adanya suatu peristiwa yang tidak selaras atau terdapat pertentangan dalam suatu peristiwa, sehingga dapat dikatakan sebagai

---

<sup>4</sup>Undang-Undang Peradilan Anak (Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2009), h. 52.

<sup>5</sup>Wagita Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), h.

permasalahan.<sup>6</sup> Oleh karena itu pengertian anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga diartikan dengan anak yang mempunyai permasalahan karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau bisa juga dikatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak nakal. *Penelantaran anak* adalah praktik melepaskan tanggungjawab dan klaim atas keturunan dengan cara illegal. Hal ini antara lain disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial dan penyakit mental.

Ruang lingkup pembahasan penelitian yaitu peneliti menitikberatkan pada Berdasarkan judul skripsi, maka dapat diketahui bahwa ruang lingkup atau pokok dari pembahasan skripsi adalah Perlindungan Anak yang Berkonflik dengan Hukum Akibat Penelantaran Orang tua (Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam).

#### **D. Kajian Pustaka**

Masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu Perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum akibat penelantaran orang tua (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam). Berikut penulis sebutkan beberapa skripsi yang membahas tentang “perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum akibat penelantaran oleh orang tua (perspektif hukum positif dan Hukum Islam)”.

1. Abdul Rahman Kanang “*Hukum Dan Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seks Komersial (Perspektif Hukum Nasional dan Internasional)* ” dijelaskan bahwa dikategorikan perbuatan pidana jika seseorang “secara sadar dan sengaja” membiarkan anak dieksploitasi, baik eksploitasi ekonomi maupun eksploitasi seksual saat anak memerlukan bantuan dan perlu dibantu.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Abdul Rahman Kanang, *Anak Berkonflik dengan Hukum (Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak)* (Makassar, Alauddin University Press, 2011), h. 63.

<sup>7</sup>Abdul Rahman Kanang “*Hukum dan Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seks Komersial (Perspektif Hukum Nasional dan Internasional)*”, (Makassar. Alauddin Press, 2014), h. 134.

Ketentuan ini juga untuk menghukum mereka yang memberikan fasilitas dan kemudahan terjadinya eksploitasi seksual anak dan mereka yang dengan sengaja tidak menghentikannya. Hukuman yang sama terjadi kepada setiap orang yang menggunakan kebohongan atau tipu muslihat untuk memujuk, atau yang mendukung anak untuk terlibat dalam tindakan seks dengannya atau orang lain. Menggunakan atau mengancam untuk menggunakan kekerasan untuk memaksa seorang anak untuk terlibat dalam perilaku seksual, atau menggunakan kebohongan atau penipuan untuk memujuk atau mendorong seorang anak untuk terlibat dalam perilaku pelecehan seksual, atau membiarkan perilaku tidak senonoh tersebut terjadi adalah dilarang.

2. Abdul Rahman Kanang “*Anak Berkonflik dengan Hukum (Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak)*” menjelaskan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan kenakalan, yang kemudian akan disebut sebagai kenakalan anak, yaitu kejahatan pada umumnya dan perilaku anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan kejahatan pada khususnya.<sup>8</sup> Anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga diartikan dengan anak yang mempunyai permasalahan karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau bisa juga dikatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak nakal.
3. Achmad Ratomi “*Penyelesaian Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Konteks Sosial Masyarakat (Penghindaran Labeling Terhadap Anak)*” dijelaskan bahwa penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum

---

<sup>8</sup>Abdul Rahman Kanang, *Anak Berkonflik dengan Hukum (Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak)*, h. 63.

secara damai yang dilakukan oleh tersangka (keluarganya) dengan korban melalui mediasi aparat kepolisian memang masih menimbulkan kontroversi.<sup>9</sup> Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum dalam konteks sosial masyarakat dapat dilakukan dengan cara penyelesaian diluar pengadilan dengan prinsip kebersamaan dan keterbukaan serta melibatkan semua pihak yang terkait seperti korban, pelaku dan pihak ketiga baik yang berasal dari tokoh masyarakat maupun dari lembaga penegak seperti kepolisian, dimana pihak ketiga tersebut bertindak sebagai mediator. Penelitian ini menekankan pada kasus anak yang berkonflik dengan hukum dalam konteks sosial masyarakat, dan tidak membahas penelantaran orang tua dan berbeda dengan peneliti yang akan membahas masalah perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum akibat penelantaran oleh orangtua.

4. Ayu Nadia Maryandani *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Penelantaran oleh Orang Tua Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia”*.<sup>10</sup> Berdasarkan hasil penelitian dari Ayu Nadia Maryandaniyang menjadi kesimpulan bahwa selain kepolisian dan advokat, dalam hal perlindungan anak pemerintah membentuk penegak hukum lainnya untuk membantu melakukan perlindungan hukum, yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan dalam rumah

---

<sup>9</sup>Achmad Ratomi, *“Penyelesaian Anak yang Berkonflik Dengan Hukum dalam Konteks Sosial Masyarakat (Penghindaran Labeling Terhadap Anak)”*, Skripsi (Kalimantan: Fak.Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, 2013), h. 134.

<sup>10</sup>Ayu Nadia Maryandani, *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Penelantaran oleh Orang Tua Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia”*. *Skripsi Online*, (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar lampung, 2016), h. 110.



tangga dimulai dari proses penyidikan di kepolisian sampai setelah selesainya proses pengadilan. Dan penelitian ini memfokuskan pada perlindungan hukum anak yang menjadi korban penelantaran orang tua, sementara pada penelitian ini peneliti akan memfokuskan berkonflik dengan hukum akibat penelantaran oleh orang tua.

5. Nasir Djamil dalam bukunya yang berjudul *Anak Bukan Untuk Dihukum*, menjelaskan tentang bentuk keseriusan anggota dewan yang terhormat dalam mengawal perlindungan anak dan bekerjasama dengan para aktivis perlindungan anak yang berjuang untuk keadilan anak-anak.<sup>11</sup> Bahwa anak yang berkonflik dengan hukum bukan untuk dihukum dengan cara yang keliru, tetapi dengan cara dibimbing dan dibina agar dapat kembali menjadi anak-anak yang baik.

## E. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis penelitian.

Terdapat banyak jenis penelitian, baik berdasarkan pada tujuan, dasar kegunaannya, lokasi atau tempat dimana penelitian dilakukan, maupun dasar metode utamanya yang dipakai. Menurut Yulius Slamet, jenis penelitian berdasarkan pada tujuannya terbagi atas penelitian eksploratoris, penelitian deskriptif dan penelitian eksploratif<sup>12</sup>. Jenis penelitian berdasarkan atas dasar kegunaannya dibagi menjadi penelitian murni (*pure research* atau *basic research*) dan penelitian terapan (*applied research*). Menurut Suriasumantri<sup>13</sup> bahwa jenis penelitian menurut metodenya

<sup>11</sup>Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 127.

<sup>12</sup>Yulius Slamet, *Metode penelitian Sosial* (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2006), h. 65.

<sup>13</sup>Suriasumantri dalam Irawan Seoharaton, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), h. 64-66.

terbagi atas penelitian historis (*historical research*), penelitian *survey*, penelitian *ex post facto*, penelitian eksperimen (*experimental research*), penelitian evaluasi (*evaluation research*), penelitian pengembangan (*research development*), penelitian tindakan (*action research*), penelitian naturalistik, dan penelitian kebijakan (*policy research*). Adapun jenis penelitian dilihat dari lokasi atau tempat dimana penelitian dilakukan, terbagi atas penelitian lapangan (*field research*), penelitian kepustakaan (*library research*), dan laboratorium. Sedangkan jenis-jenis penelitian yang dibedakan atas dasar metode utamanya dipakai terbagi atas penelitian *survey*, penelitian kasus (*case research*), penelitian eksperimen (*experimental research*), penelitian grounded (*grounded research*).<sup>14</sup>

Sedangkan menurut Sukmadinata<sup>15</sup> jenis data dan analisisnya, penelitian dibedakan menjadi penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, penelitian gabungan kualitatif dan kuantitatif. Dan masih banyak lagi jenis penelitian lainnya seperti menurut tingkat eksplanasi (penjelasannya), menurut tingkat, menurut sifat permasalahannya, dan lain-lain. Karena penelitian ini adalah penelitian hukum, maka dalam penyusunan skripsi ini digunakan istilah jenis penelitian hukum. Dalam penelitian hukum dikenal dua jenis penelitian yaitu penelitian normatif (doktrinal) dan penelitian empiris.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (doktrinal). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>16</sup> Pengertian

---

<sup>14</sup>Yulius Slamet, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Indonesia, 2016), h. 71.

<sup>15</sup>Sukmadinata dan Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2011), h. 34.

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 13-14.

ini difokuskan pada bahan yang digunakan di dalam penelitiannya. Bahan yang diteliti di dalam penelitian hukum normatif adalah bahan pustaka atau data sekunder.

## **2. Pendekatan penelitian.**

Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang ingin melihat sinkronisasi peraturan perundang-undangan serta kesesuaian antara ketentuan hukum atau perundang-undangan mengenai kedudukan dan fungsi Kejaksaan RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

## **3. Sumber data.**

Penelitian ini adalah penelitian normatif atau penelitian pustaka sehingga hanya menggunakan data sekunder. Penelitian ini menelaah literatur-literatur yang berhubungan dan membangun penelitian ini. Data sekunder tersebut terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku hukum, jurnal hukum, majalah hukum yang berkaitan erat dengan pembahasan skripsi ini.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan hukum yang membantu dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti kamus, ensiklopedia<sup>17</sup>.

## **4. Metode pengumpulan data.**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menelusuri beberapa literature berupa buku, jurnal, dan sumber/literature lainnya yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini. Selain itu, juga diperoleh dari

---

<sup>17</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Rajawali, 2011), h. 30.

dokumen-dokumen dengan cara melihat dokumen-dokumen bisa berbentuk tulisan (peraturan dan keputusan), gambar atau karya-karya yang momental yang bersangkutan dengan penelitian ini.

### **5. Teknik pengolahan dan analisis data.**

Penelitian ini menggunakan berbagai teknik pengolahan data yaitu:

- a. Reduksi Data ialah proses mengubah data kedalam pola, fokus, kategori, atau pokok permasalahan tertentu.
- b. Penyajian Data ialah menampilkan data dengan cara memasukkan data dalam bentuk yang di inginkan seperti memberikan penjelasan dan analisis.
- c. Pengambilan Kesimpulan ialah mencari simpulan atas data yang direduksi dan disajikan.

Analisis data yang digunakan yakni analisis deskriptif kualitatif yaitu teknik pengolahan data kualitatif (kata-kata) yang dilakukan dalam rangka mendeskripsikan/ membahas hasil penelitian dengan pendekatan analisis konseptual dan teoretik, serta mengolah data dan menyajikan dalam bentuk yang sistematis, teratur dan terstruktur serta mempunyai makna.

### **F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan penelitian.**

- a. Untuk mengetahui konsep perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum akibat penelantaran orang tua menurut undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap konsep perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum akibat penelantaran orang tua.

## **2. Kegunaan penelitian.**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis sebagai berikut:

- a. Kegunaan teoretis, penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca tentang bagaimana penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, dan menambah wawasan keilmuan bagi para pembaca sehingga dapat memahami bagaimana Islam memandang gerakan-gerakan perempuan yang dianggap kekinian.
- b. Kegunaan praktis, berupa memberikan sumbangsih pemikiran bagi pihak-pihak yang ingin meneliti tentang penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum ataupun bagaimana hukum Islam kontemporer memandang kedua hal tersebut.



## **BAB II**

### **KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM**

#### **TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM**

##### **A. *Konsepsi Anak***

###### **1. Definisi anak.**

Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa. Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Anak, anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “ Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

Istilah ini juga sering merujuk pada perkembangan mental seseorang, walaupun usianya secara biologis dan kronologis seseorang sudah termasuk dewasa namun apabila perkembangan mentalnya ataukah urutan umurnya maka seseorang dapat saja diasosiasikan dengan istilah "anak".

Di Indonesia berbagai peraturan lainnya yang berkaitan dengan masalah anak.

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>1</sup>
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (1) Tentang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal

---

<sup>1</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1.



telah mencapai umur 8 (delapan) Tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun dan belum pernah kawin.<sup>2</sup>

- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 2 Tentang Kesejahteraan Anak. Menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) Tahun dan belum pernah kawin.<sup>3</sup>
- d. Sedangkan menurut Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pengertian anak adalah setiap manusia yang berumur 18 (delapan belas) Tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.<sup>4</sup>
- e. Pelanggaran asusila terhadap anak dibawah umur diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

## **2. Anak berkonflik dengan hukum.**

Anak sebagai manusia yang masih kecil, sedang tumbuh dan berkembang, baik fisik mental maupun intelektualnya. Pada masa perkembangan tersebut setiap anak sedang berusaha mengenal dan mempelajari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat serta berusaha meyakinkannya sebagai bagian dari dirinya. Sebagian kecil anak tak dapat memahami secara utuh aturan hidup di dalam masyarakat baik disebabkan oleh kurangnya perhatian orang tua, kurang kasih sayang, kurang kehangatan jiwa, kekerasan di dalam keluarga dan masyarakat yang membawa dampak pada terbentuknya sikap dan perilaku menyimpang anak di masyarakat.

Sebagian perilaku menyimpang anak-anak tersebut bersentuhan dengan ketentuan hukum. Anak-anak inilah yang disebut anak yang berkonflik dengan

---

<sup>2</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak,

<sup>3</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak,

<sup>4</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 (ayat 5).

hukum. Konflik berasal dari kata kerja latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.<sup>5</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kata nakal diganti dengan menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum, pada Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya yang disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana<sup>6</sup>.

Penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah merupakan tanggung jawab dan kewajiban bersama antara masyarakat dan pemerintah, seperti dijelaskan dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak<sup>7</sup>, yaitu:

- a. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, meliputi anak berkonflik dan korban tindak pidana adalah merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- b. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:
  - 1) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak,
  - 2) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini,

---

<sup>5</sup><http://id.wikipedia.org/wiki/konflik>, diakses pada tanggal 11 November 2017.

<sup>6</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 (ayat 3).

<sup>7</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 64.

- 3) Penyediaan sarana dan prasarana khusus,
  - 4) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik anak,
  - 5) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum,
  - 6) Pemberian jaminan untuk berhubungan dengan orang tua atau keluarga, dan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan menghindari labelisasi.
- c. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dilaksanakan melalui:
- 1) Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga,
  - 2) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan labelisasi,
  - 3) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun, maupun sosial, dan
  - 4) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Penelantaran Anak**

### **1. Definisi penelantaran.**

Penelantaran adalah adalah sebuah tindakan baik disengaja maupun tidak disengaja yang membiarkan anak tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya (sandang, pangan, papan).<sup>8</sup> Penelantaran anak adalah praktik melepaskan tanggung jawab dan klaim atas keturunan dengan cara ilegal. Hal ini antara lain disebabkan oleh faktor-faktor seperti faktor ekonomi dan sosial, serta penyakit mental. Seorang anak yang

---

<sup>8</sup><http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42362/1/AHMAD%20ROSYADI-FSH.pdf>.

ditinggalkan atau dibuang oleh orang tuanya disebut dengan bayi telantar atau anak buangan (berbeda dengan anak yang kabur (yatim piatu).

Sedangkan penelantaran bayi mengacu pada orangtua (biasanya ibu) yang meninggalkan atau membuang bayinya yang berusia kurang dari 12 bulan dengan sengaja di tempat umum ataupun tempat tersembunyi dengan maksud untuk membuangnya.

## **2. Pengertian anak terlantar.**

Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan dan atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya sehingga kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosialnya tidak terpenuhi. Anak terlantar adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang karena sebab tertentu (karena beberapa kemungkinan: kemiskinan, salah seorang dari orangtua/wali sakit, salah seorang/kedua orangtua/wali pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh) sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar dengan wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial.

Anak terlantar adalah anak karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial yang dimaksud anak terlantar adalah anak yang tinggal dalam keluarga miskin usia sampai dengan 18 tahun. Menurut A Friedlander, anak terlantar adalah anak yang tidak mendapatkan asuhan secara minimal dari orang tuanya sebab kondisi keluarganya baik ekonomi, sosial, kesehatan jasmani maupun psikisnya tidak layak sehingga anak-anak tersebut membutuhkan adanya bantuan

pelayanan dari sumber-sumber yang ada di masyarakat sebagai pengganti orang tuanya.<sup>9</sup>

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 1 ayat (7) Tentang Kesejahteraan Anak, anak terlantar adalah: “anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial”.<sup>10</sup>

### **3. Dampak penelantaran anak.**

Seorang anak yang sejak usia dini kurang memperoleh kasih sayang, diterlantarkan begitu saja atau bahkan menjadi objek tindak kekerasan oleh orang tuanya sendiri, maka jangan heran ketika anak-anak itu mulai muncul masalah. Mula-mula mungkin ia mencoba merokok karena terpengaruh teman, kemudian minum-minuman hingga mabuk, berjudi, berkelahi, mengenal kehidupan seksual dalam usia dini dan sekaligus terancam tertular PMS (penyakit menular seksual), terlibat dalam perilaku kriminal, dan kemudian anak-anak yang diterlantarkan tersebut menjadi bagian dari pelaku patologi sosial yang meresahkan masyarakat.<sup>11</sup>

Waluyo mengemukakan bahwa permasalahan yang dapat ditimbulkan oleh anak terlantar diantaranya<sup>12</sup> adalah:

- a. Pengemis, pada umumnya orang menjadi pengemis sebagai akibat dari tekanan ekonomi keluarga sehingga demi mempertahankan hidupnya dengan cara meminta-minta di depan umum.

---

<sup>9</sup><http://torehanjalanan.wordpress.com/2012/4/14/anak-jalanan/>, (Diakses pada 6 November 2016).

<sup>10</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 (ayat 7).

<sup>11</sup>Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 218.

<sup>12</sup><http://torehanjalanan.wordpress.com/2012/4/14/anak-jalanan/>, 6 November.

- b. Kenakalan anak dan kriminalitas, kenakalan anak atau tindak kejahatan disebabkan oleh tekanan hidup yang mendesak, maupun kehidupan di masa depan yang suram dan sebagai kompensasi dari hidup yang berstatus anak terlantar.
- c. Akibat pengangguran, pemenuhan kebutuhan yang diinginkan tidak terpenuhi seperti kebutuhan akan pendidikan sebagai bekal hidup di masa yang akan datang, maka banyak anak-anak menganggur atau tidak memiliki keahlian dan keterampilan tertentu.

Adapun Dampak lain Penelantaran Anak adalah:

- a. Kecepatan perkembangan fisik maupun emosional dari seorang anak yang dianiaya atau ditelantarkan seringkali tidak normal.
- b. Bayi yang mengalami kekurangan kasih sayang dari orang tuanya tampak tidak peka atau tidak menunjukkan ketertarikan terhadap lingkungannya. Mungkin terjadi gangguan pada kemampuan sosial dan bahasanya karena mereka kurang mendapatkan perhatian.
- c. Seorang anak mungkin menunjukkan sikap curiga, tidak tegas dan sangat gelisah.
- d. Anak yang lebih tua sering bolos sekolah atau prestasinya di sekolah kurang baik. Mereka mungkin mengalami masalah dalam membentuk hubungan dengan teman-teman maupun guru di sekolahnya.
- e. Penampilan tampak sangat lusuh tidak terawat, karena tidak diurus dan mungkin bisa jadi tidak punya siapa-siapa setelah ditelantarkan.

#### 4. Bentuk penelantaran anak.

Penelantaran Anak adalah dimana orang dewasa yang bertanggung jawab gagal untuk menyediakan kebutuhan memadai untuk berbagai keperluan, termasuk fisik, emosional, pendidikan atau medis.<sup>13</sup>

- a. Penelantaran fisik, misalnya keterlambatan mencari bantuan medis, pengawasan yang kurang memadai serta tidak tersedianya kebutuhan akan rasa aman dalam keluarga.
- b. Penelantaran pendidikan, terjadi ketika anak seakan-akan mendapat pendidikan yang sesuai padahal anak tidak dapat berprestasi secara optimal.
- c. Penelantaran secara emosi, dapat terjadi misalnya ketika orangtua memberikan perlakuan dan kasih sayang yang berbeda di antara anak-anaknya.
- d. Penelantaran fasilitas medis, hal ini terjadi karena ketika orangtua gagal menyediakan layanan medis untuk anak meskipun secara finansial memadai.<sup>14</sup>

#### C. *Tinjauan Umum tentang Hak-Hak Anak*

Pada dasarnya semua manusia mempunyai keinginan untuk hidup bahagia, sebagai pelengkap atas kebahagiaan itu, manusia memilih untuk mencari pasangan hidup yang akan dibawa dalam pernikahannya dan dari pernikahan yang bahagia itu akan menghasilkan buah hati (anak) dari hasil pernikahan tersebut. Anak dalam masyarakat merupakan pembawa kebahagiaan, hal ini dapat dibuktikan dalam setiap upacara pernikahan, terdapat doa restu dan harapan semoga kedua insan atau kedua mempelai dikaruniai anak.

Tentunya anak yang lahir diharapkan menjadi anak yang berguna bagi keluarga, nusa dan bangsa di masa mendatang, bukan untuk menjadi pengemis,

---

<sup>13</sup>Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, h. 43.

<sup>14</sup>Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, h. 54.

gelandangan atau anak yang terlantar dijalan tanpa ada dampingan atau perlindungan dari keluarganya atau orang tuanya. Pada kedudukan seorang anak, akibat dari belum dewasa, menimbulkan hak-hak anak yang perlu direalisasikan dengan ketentuan hukum khusus yang mengangkut urusan hak-hak keperdataan anak tersebut.

Sebagaimana termuat dalam UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Disebutkan dalam UU No.1 tahun 1974 pasal 45 ayat 1 yaitu:

“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”

Sedangkan Ayat 2 disebutkan yaitu:

“Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antar keduanya putus”

Berdasarkan pasal tersebut berarti bahwa walaupun kedua orang tua anak telah berpisah atau bercerai, tetapi kewajiban sebagai orang tua untuk memberikan haknya kepada anaknya tidaklah putus. Anak harus tetap mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 45 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, kesadaran dunia internasional terhadap pentingnya jaminan atas hak anak dikemukakan dalam konvensi hak anak (*convensi on the rightof children*) pada tahun 1989 dimana hampir semua negara meratifikasi hasil dari konvensi hak anak tersebut.

Sebagaimana tercantum dalam pasal 3 ayat (2) dalam konvensi hak anak yang menyatakan bahwa:

“Negara-negara peserta berusaha untuk menjamin bahwa anak-anak akan mendapat perlindungan dan perawatan seperti yang diperlukan bagi kesejahteraannya, dengan memperhatikan hak-hak dan tanggung jawab orang tua, wali atau perorangan lainnya yang secara hukum bertanggung jawab atas



anak itu, dan, untuk tujuan ini, akan mengambil semua langkah legislatif dan administratif yang tepat”.

### **1. Hak-hak anak.**

Anak memiliki beberapa hak, diantaranya:

- a. Hak mendapatkan nama atau identitas.
- b. Hak untuk memiliki kewarganegaraan. Dengan akte kelahiran, anak akan memperoleh haknya mendapat Kartu Tanda Penduduk Indonesia ketika dewasa kelak, dan juga paspor. Ada pengecualian bagi anak dengan orangtua berkebangsaan Indonesia yang lahir di Amerika Serikat, misalnya. Sebab ia berhak untuk mendapatkan status kewarganegaraan ganda terbatas, hingga ia berusia 18 tahun. Di atas usia itu, anak harus memilih satu kewarganegaraan saja.
- c. Hak memperoleh perlindungan. Anak laki-laki maupun perempuan berhak dilindungi dari segala macam bentuk kekerasan fisik dan psikis dan perlakuan yang merugikan anak.
- d. Hak memperoleh makanan. Untuk dapat tumbuh dan berkembang, anak membutuhkan makanan dengan kualitas gizi yang baik. Salah satu contohnya adalah memberi bayi ASI eksklusif hingga usia 6 bulan. Selanjutnya perlu dipastikan balita atau anak mengonsumsi makanan yang baik.
- e. Hak atas kesehatan tubuh yang sehat akan membuat anak berkembang optimal. Hal mendasar untuk membuatnya sehat adalah memberinya makanan layak, menyiapkan lingkungan bersih, membiasakan mandi dan mencuci tangan setiap hari, dan memberi pakaian yang layak dan bersih.
- f. Hak mendapatkan pendidikan orang tua adalah pendidik pertama bagi anak. Apa yang ia dengar, lihat, dan rasakan di rumah, bisa memengaruhi cara pandangnya kelak. Mendaftarkannya ke sekolah yang sesuai dengan usianya.

- g. Hak bermain. Bermain adalah dunia anak. Lewat bermain, anak belajar tentang dunia di sekitarnya.
- h. Hak untuk berperan dalam pembangunan. Misalnya dengan mengajak menjaga kebersihan dengan selalu membuang sampah pada tempatnya. Mengenalkan nama Presiden Republik Indonesia.
- i. Hak untuk mendapatkan kesamaan. Hak untuk mendapat kesamaan ini berhubungan dengan beberapa hak anak lainnya yang disebutkan di atas (hak mendapatkan identitas, kewarganegaraan, pendidikan, makan, bermain, kesehatan, memperoleh perlindungan dan hak untuk berperan dalam pembangunan). Artinya, kesemua hak anak berhak diberikan tanpa membedakan anak satu dengan anak lainnya, karena anak berhak mendapat kesamaan.

## **2. Prinsip-prinsip perlindungan anak.**

Prinsip-prinsip perlindungan anak anatara lain:<sup>15</sup>

- a. *Non-Discrimination.*

Yang dimaksud non-diskriminasi adalah penyelenggaraan perlindungan anak yang bebas dari bentuk apapun tanpa memandang etnis, agama, keyakinan politik, dan pendapat-pendapat lain, kebangsaan, jenis kelamin, ekonomi (kekayaan, ketidakkemampuan), keluarga, bahasa dan kelahiran serta kedudukan dari anak dalam status keluarga. Dalam pasal 13 dan 77 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa perlindungan anak dari diskriminasi adalah hak yang dilindungi hukum dan bagi yang melanggar hak tersebut dipidana, khususnya dalam bidang pengasuhan anak.

---

<sup>15</sup> Abdul Rahman Kanang, *Anak Berkonflik Dengan Hukum (Upaya perlindungan hukum Dan Pemenuhan hak-Hak konstitusionalnya)*, (Makassar: Alauddin Press University, 2014), h. 108.

Apa yang telah dirumuskan di atas tentang non-diskriminasi ditemukan pula dalam ajaran Islam. Dalam Al-Qur'an terdapat larangan tindakan diskriminatif (*ahabbu ilaa .....min*) pada anak. Seperti digambarkan dalam surat Yusuf ayat 8 bahwa Nabi Ya'kub lebih mencintai Yusuf daripada anaknya yang lain yaitu Bunyamin. Akibatnya Bunyamin dan saudara-saudara yang lainnya makar pada Yusuf, dengan melakukan tindakan kekerasan kepadanya, yaitu memasukkan Yusuf ke dalam Sumur. Ayat ini mengajarkan kepada kita agar tidak diskriminatif dalam memperlakukan anak, lebih-lebih pada anak yatim. Allah berfirman dalam QS An-Nisa /4:127 yang berbunyi:

... وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ  
عَلِيمًا

Terjemahnya:

... dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya.<sup>16</sup>

Menurut adat Arab Jahiliyah seorang Wali berkuasa atas wanita yatim yang dalam asuhannya dan berkuasa akan hartanya, jika wanita yatim itu cantik dikawini dan diambil hartanya, jika wanita itu buruk rupanya, dihalanginya kawin dengan laki-laki yang lain supaya dia tetap dapat menguasai hartanya. kebiasaan di atas dilarang melakukannya oleh ayat ini.

Dalam beberapa hadits banyak ditemukan ajaran agar bersifat adil terhadap anak-anaknya. Diantaranya Nabi melarang sikap orang tua yang diskriminatif. Nabi bersabda: “Jika orang tua ingin dihormati oleh anaknya maka sudah barang tentu anak harus dididik dengan sebaik-baiknya dengan memperlakukan anak dengan adil,

<sup>16</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 168.

tidak memihak pada salah satu anak”. Nabi Bersabda: “Takutlah kalian kepada Allah dan berbuat adillah pada anak-anak kalian”. (*Ittakullaha wa'adiluu fii aulaadikum*, HR. Muslim). Pada suatu ketika Nabi memberi peringatan pada orang tua yang lebih mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan dalam hal memberikan curahan kasih sayang (HR. Bazaar) dan tentang kasus Nu'man yang diskriminatif terhadap anak perempuan dalam hal memberikan pemberian (HR. Bukhari).

b. *The best of interest of child.*

Yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best of interest of child*) adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama (Pasal 3 ayat 1 Konvensi Hak Anak).

Dalam sejarah Islam baik pada masa Nabi Muhammad SAW maupun Khulafaurrasyidin terdapat banyak peristiwa yang menggambarkan pemihakan Islam terhadap anak bila terjadi peristiwa keluarga yang terkait dengan status dan kepentingan anak. Diantaranya dalam hal dimana orangtua diberi kesempatan untuk mengelola harta anak, namun dalam perjalanannya cenderung merugikan anak.

Salah satu contohnya adalah kasus hak harta anak. Disebutkan dalam riwayat, bahwa “sesungguhnya anakmu adalah hasil kerja kerasmu yang paling baik, maka makanlah apa yang kamu perlukan dari hasil anakmu” (HR. Ibnu Hibban). Hal serupa ditemukan dalam riwayat Baihaqi dari Abu Hurairah berkata: bahwa pada suatu ketika ada seorang laki-laki menemui Abu Bakar dan berkata bahwa “Ayahku mengambil seluruh hartaku untuk keperluannya dan tidak menyisakan sedikitpun”. Abu Bakar berkata, bahwa “harta anakmu itu tidak boleh digunakan seluruhnya”

Ayah laki-laki berargumen, bahwa Rasulullah bersabda, bahwa “kamu dan hartamu adalah milik orang tuamu” Abu bakar menjawab, ya betul, akan tetapi yang dimaksud adalah nafkah yang wajib.” (HR. Ibnu Majah).

Hadits tersebut di atas menunjukkan adanya hak yang dilindungi oleh Islam, dalam arti ketaatan dan pengabdian adalah sentral kunci seorang muslim, namun pengabdian itu tidak boleh merugikan hak-hak anak itu sendiri. Seperti disebutkan dalam *Mu'jam Al-Mughni* tulisan Ibn Qudamah, bahwa pemanfaatan harta anak oleh orang tua harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 1). Tidak memberatkan dan tidak membahayakan si anak dan tidak mengambil sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh si anak tersebut; 2). Harta dimaksud tidak diberikan pada orang lain.

c. *Survival and Development of Child.*

Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah masyarakat, keluarga, dan orang tua (Pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2002). Dalam ajaran Islam anak adalah bukan saja anugerah Allah, tetapi juga adalah amanah. Islam memandang bahwa Anak memiliki hak tumbuh kembang dan hak hidup yang mendasar.

Hal ini dapat dilihat dalam satu kisah Ju'alan. Ada suatu ketika ada seseorang pria mengadukan anaknya yang durhaka kepada Khalifah Umar seraya berkata “Apakah kamu tidak takut kepada Allah bila kamu durhaka kepada orang tua ini”? Lalu anak itu menjawab, “wahai amirul mukminin, apakah ada hak bagi anak dari ayahnya ? Ya, ada, yaitu dilahirkan dari ibunya, memberikan nama yang baik dan mengajarkannya kitab suci”. Anak itu berkata” demi Allah, ibuku hanya seorang budak yang dibeli dengan harga 400 dirham, ia tidak memberi nama yang baik, tetapi

memberi nama Ju'alan, dan tidak mengajarku kitab suci walaupun hanya satu ayat. Kemudian Umar berpaling pada ayahnya dan berkata,” engkaulah yang durhaka kepada anakmu, bukan anakmu yang durhaka, pergilah dari sini,” (HR. Thabrani). Dalam bidang ekonomi, anak juga memiliki hak yang harus dilindungi. Allah swt. berfirman dalam QS Al-Baqarah /1:233 yang berbunyi:

.... وَعَلَى الْوَالِدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Terjemahnya:

.... dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.<sup>17</sup>

Nabi bersabda: “*qafaa bima itsman ayyudhoyyi'a man yakuutu*” (cukuplah dosanya bagi orang yang menyalah-nyakan orang berhak diberi hak dirinya”. (HR. Abu Dawud dan Ahmad).

d. *Recognition for free expression.*

Prinsip keempat dari prinsip dasar perlindungan anak adalah penghargaan terhadap pendapat anak. Yang dimaksud dengan prinsip ini adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya dan mainan yang dikehendaki.

Dalam pandangan Islam, anak tidak saja memiliki kebebasan menyatakan pendapat, tetapi juga didorong untuk mampu menyampaikan pendapatnya dan mengekspresikan kesenangannya secara leluasa. Misalnya, Rasulullah tidak pernah menyela sekelompok anak yang mengekspresikan kesenangannya dalam sebuah arena permainan, kecuali beliau mengucapkan salam dan ikut menjaga dan

<sup>17</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahanya*, h. 60.

menyaksikan, karena nabi senang pada kegembiraan dan keceriaan anak yang sedang bercanda dan bermain (HR. Ahmad).

Yang menarik dari pentauladanan Nabi dalam memperlakukan anak adalah tidak pernah membunuh gagasan (*shut down*), tetapi justru memberikan *inspiring* pada anak dengan menghindari kata-kata yang menghina (*famaa kaala lahuu uffun*) dan meninggalkan kata-kata mendikte (*walaa alla shana'ta* –HR. Bukhari Muslim). Yang banyak ditampilkan Nabi adalah kearifan dalam memperlakukan anak. Misalnya, ketika terjadi perbedaan pendapat dengan anak-anak beliau memperlakukan secara bijaksana dengan menggunakan kata-kata “*fashabrun alaihinna* (sabarlah terhadap mereka)”. Kemudian “*faahsin shuhbatahunna*” (bergaulah dengan baik sesama mereka) (HR. Ahmad).

Sejalan dengan ini, Al-Ghazali menyarankan dalam kitab *Ihya' Ulumuddin Juz 3*, bahwa janganlah memperbanyak ucapan mencela anak karena hal tersebut akan membuat anak meremehkan celaan, yang pada gilirannya akan membuat anak tidak menghargai nasehat-nasehat orang tua. Karena itu, pendapat seorang anak perlu dihargai, walaupun tidak sependapat dengannya jangan sampai keluar kata-kata mendikte apalagi mencela, apalagi menghentikan ekspresi pendapat anak (HR. Ahmad).

Kehadiran Islam sesungguhnya untuk menyelesaikan problem kemanusiaan. Bagaimana mereka harus bersikap, bersosialisasi, menyelesaikan masalah, senantiasa meniscayakan adanya panduan dari ajaran yang dibawa, meski tidak secara formal. Namun demikian, tidak seluruh ajaran Islam terperinci secara detail, sebagian unsur ajaran masih global dan belum bisa difungsikan secara praktis. Ini bukan mencitrakan adanya problem pada ajaran agama, justru mengandaikan adanya ruang bagi manusia

untuk membaca kalam Tuhan, dan memahami sesuai dengan kemampuan, kebutuhan untuk menyelesaikan problem kemanusiaan termasuk masalah anak. Di masyarakat sangat mudah ditemukan pemahaman terhadap ajaran Islam yang tekstual. Tekstualisme pemahaman itu dikarenakan oleh kuatnya pengakuan terhadap produk tafsir klasik. Padahal setiap produk tafsir memiliki ruang dan zamannya. Tidak setiap produk tafsir aplikatif di setiap zaman. Yang berdiri di lintas zaman dan ruang adalah prinsip dasar dari ajaran Islam. Islam sesungguhnya bukanlah apa yang ada dalam tafsir. Karena tafsir hanyalah hasil ijtihad ulama pada masanya.

Islam adalah agama ramah kepada semua. Anak merupakan bagian dari yang dimulyakan Islam. Rasulullah Saw mengajarkan kepada kita untuk menyayangi keluarga termasuk anak di dalamnya. Ini menandakan bahwa Rasul mengajarkan umatnya untuk ramah terhadap hak anak. Sabda Rasulullah Saw: *"Orang yang paling baik di antara kamu adalah yang paling penyayang kepada keluarganya.* Islam juga mensyariatkan untuk memperhatikan kualitas generasi penerusnya, sebagaimana firman Allah dalam QS An-Nisa /4:9 yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Terjemahnya:

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.<sup>18</sup>

Teks di atas sesungguhnya dapat menjadi *counter* terhadap beragam tindak kekerasan anak atas nama agama yang ada di masyarakat. Dalam Islam prinsip perlindungan anak merupakan ajaran universal dan bukan ajaran partikular. Ajaran

<sup>18</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahanya*, h. 78.



universal adalah ajaran yang tidak dibatasi oleh lintas ruang dan waktu. Kapanpun dan dimanapun semangat perlindungan yang diajarkan oleh Islam hendaknya dapat menyemangati seluruh sendi-sendi kehidupan manusia. Jangan sampai harmonitas keluarga terkikis habis, karena persoalan labelisasi kekerasan pada agama. Bila ini terjadi, nama besar agama sebagai agama rahmat akan ternodai.

Salah satu *entry point* untuk menyelesaikan persoalan kekerasan berbasis agama adalah reinterpretasi terhadap ajaran Islam. Tujuannya dapat mem-*breakdown* prinsip universal ajaran agama agar benar-benar menjadi rahmat bagi semua orang. Ini akan menjadi pilar penting dalam pengarusutamaan perlindungan anak di lintas sektoral. Terlebih nilai dasar agama memiliki urgensi yang tinggi untuk membangun budaya anti kekerasan terhadap anak. Memang tidak semua bentuk dan jenis kekerasan anak atas nama agama dapat dinisbatkan pada pemahaman agama yang tekstual. Masih ada variabel lain yang turut menyumbang terjadinya perilaku kekerasan agama. Namun dibanding variabel lainnya, variabel ini cukup berpengaruh mendorong timbulnya perilaku kekerasan anak.

### BAB III

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK

### DAN KEWAJIBAN ORANG TUA

#### A. *Kebijakan Perlindungan Anak*

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia, tidak terdapat pengaturan yang tegas tentang kriteria anak. Lain peraturan perundang-undangan, lain pula kriteria anak. Pasal 330 kitab undang-undang hukum perdata menentukan bahwa belum dewasa apabila belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Pasal 1 ayat (2) UU no.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menentukan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Pasal 1 ayat (1) UU pokok perburuan (UU No.12 Tahun 1948) menentukan bahwa anak adalah seorang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun ke bawah.

Menurut hukum adat, seseorang dikatakan belum dewasa bilamana seorang itu belum menikah dan berdiri sendiri sebelum terlepas dari tanggung jawab orang tua<sup>1</sup>. Hukum adat menentukan bahwa ukuran seseorang telah dewasa bukan dari umurnya, tetapi ukuran yang dipakai adalah dapat bekerja sendiri, cakap mengurus kekayaan sendiri.<sup>2</sup> Hukum Islam menentukan bahwa anak di bawah umur adalah yang belum *akil baliqh*.<sup>3</sup> Batas umur seseorang belum atau sudah dewasa (*minderjarig*), apabila ia belum berumur 15 (lima belas) tahun kecuali apabila sebelumnya itu sudah memperlihatkan telah matang untuk bersetubuh (*geslachtssrijp*) tetapi tidak boleh

---

<sup>1</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat Dalam Yurisprudensi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h. 11.

<sup>2</sup>Irma Soetyawati Sumitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h. 19.

<sup>3</sup>Rotiq Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 55.

kurang dari 9 (sembilan) tahun.<sup>4</sup> Menurut Zakariya Ahmad Al Barry, dewasa maksudnya adalah cukup umur untuk berketurunan dan muncul tanda laki-laki dewasa pada putra, muncul tanda-tanda wanita dewasa pada putri inilah yang wajar, yang biasanya belum ada sebelum anak putra berumur 12 (dua belas) tahun dan putri berumur 9 (sembilan) tahun. Kalau anak mengatakan bahwa dia dewasa, keterangannya dapat diterima karena dia sendiri yang mengalami. Kalau sudah melewati usia tersebut di atas tetapi belum nampak tanda-tanda yang menunjukkan bahwa ia telah dewasa, harus ditunggu sampai ia berumur 15 tahun.<sup>5</sup>

Sugiri mengatakan bahwa selama di tubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan orang itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 20 (dua puluh) tahun untuk laki-laki, seperti halnya di Amerika, Yugoslavia dan Negara Barat lainnya.<sup>6</sup>

Zakiah Darajat mengatakan bahwa mengenai batas usia anak-anak dan dewasa berdasarkan pada usia 9 (sembilan) tahun antara 13 (tiga belas) sampai 21 (dua puluh satu) tahun sebagai masa remaja merupakan masa peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa, dimana anak-anak mengalami pertumbuhan yang cepat di segala bidang dan mereka bukan lagi anak-anak baik bentuk badan, sikap, cara berfikir dan bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup>Wirjono Prodjokiriono, *Hukum Perkawinan Di Indonnesia* (Bandung: Sumur, 1981), h.82.

<sup>5</sup>Zakariya Ahmad Al Bahry, *Hukum Anak Dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, ), h.114.

<sup>6</sup>Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak Dan Remaja* (Bandung: Amrico, 1984), h.34.

<sup>7</sup>Zakiah Darajat, *Kesehatan Mental* ( Jakarta: Inti Idayu Press, 1983), h.101.

Hilman Hadikusuma menengatakan bahwa menarik batas antara belum dewasa dengan sudah dewasa, tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun belum berwewenang kawin.<sup>8</sup>

Dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pada pasal 1 angka 1 ditentukan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Pasal 1 angka 1 UU No. 23 tahun 2002 tentang seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak adalah konsekuensi penerapannya dikaitkan dengan berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, sosial politik, dan budaya masyarakat. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan terdapat perbedaan ketentuan yang mengatur tentang anak, hal ini dilatar belakangi berbagai faktor yang merupakan prinsip dasar yang terkandung dalam dasar pertimbangan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan yang berkaitan dengan kondisi dan perlindungan anak.<sup>9</sup>

Berkaitan dengan kekuatan hukum/peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengertian anak nakal, tidak terlepas dari kemampuan anak mempertanggung jawabkan kenakalan yang dilakukannya. Pertanggung jawaban pidana anak diukur dari tingkat kesesuaian antara kematangan moral dan kejiwaan

---

<sup>8</sup>Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000), h. 27.

<sup>9</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), h. 32.

anak dengan kenakalan yang dilakukan anak, keadaan kondisi fisik, mental dan sosial menjadi perhatian. Dalam hal ini dipertimbangkan berbagai komponen seperti moral dan keadaan psikologis dan ketajaman pikiran anak dalam menentukan pertanggung jawabannya atas kenakalan yang diperbuatnya.<sup>10</sup>

### **1. Pengertian perlindungan anak.**

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terlebih dahulu.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, h. 33.

<sup>11</sup>Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, h. 33.

Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.<sup>12</sup>

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun dari anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.<sup>13</sup>

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua bagian, yaitu perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan anak dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Berdasarkan hasil seminar perlindungan anak/remaja oleh Prayuna pusat tanggal 30 mei 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak yaitu:”<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Arif Gosita, dalam Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, h. 33.

<sup>13</sup>Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, h. 34.

<sup>14</sup>Irma Soetyawati Sumitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, h. 19.

- a. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
- b. Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.”

Pasal 1 angka 2 UU No. 35 tahun 2014 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak juga diartikan sebagai segala upaya yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya.<sup>15</sup> Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent*, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani, maupun sosial.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>16</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, h. 35.

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.<sup>17</sup> Sehubungan dengan hal ini, Abdul Hakim Garuda Nusantara, mengatakan:

“Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, budaya.”<sup>18</sup>

Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu:<sup>19</sup>

- a. Luas lingkup perlindungan:
  - 1) Perlindungan yang pokok meliputi antara lain: sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum.
  - 2) Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohani.
  - 3) Mengenali pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
- b. Jaminan pelaksanaan perlindungan:
  - 1) Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.

---

<sup>17</sup>Maidin Gultom, *Aspek Hukum Pencatatan Kelahiran Dalam Usaha Perlindungan Anak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), h. 54.

<sup>18</sup>Abdul Hakim Garuda Nusantara, dalam Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, h. 35.

<sup>19</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, h. 35.



- 2) Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggung jawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
- 3) Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di Negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis)

Pengertian perlindungan anak dapat juga dirumuskan sebagai:<sup>20</sup>

- a. Suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan ini merupakan keadilan sosial, yang merupakan dasar utama perlindungan anak.
- b. Suatu usaha bersama melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif.
- c. Suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Menurut proporsi yang sebenarnya, secara dimensional perlindungan anak beraspek mental, fisik dan sosial. Hal ini berarti bahwa pemahaman, pendekatan, dan penanganan anak dilakukan secara integrative, interdisipliner, intersektoral, dan interdepartemental.
- d. Suatu hasil interaksi antara pihak-pihak tertentu, akibat adanya suatu interelasi antara pihak-pihak tertentu, akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhinya. Jadi perlu diteliti, dipahami dan dihayati oleh siapa saja (objek dan subjek hukum) yang terlibat sebagai komponen pada adanya (eksistensi) perlindungan anak tersebut. Selain itu perlu juga diteliti, dipahami dan dihayati gejala mana saja mempengaruhi adanya perlindungan anak.

---

<sup>20</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, h. 36.

Perlindungan anak merupakan permasalahan yang rumit dan sulit sehingga penanggulangannya harus dilakukan secara simultan dan bersama-sama.

- e. Suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu, seperti kepentingan yang dapat menjadi motivasi, lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren, pemerintah dan sebagainya), nilai-nilai sosial, norma (hukum), status peran dan sebagainya. Agar dapat memahami dan menghayati secara tepat sebab-sebab orang melakukan perlindungan anak sebagai suatu tindakan individu (sendiri-sendiri atau bersama-sama), maka dipahami unsur-unsur struktur sosial yang terkait.
- f. Dapat merupakan suatu tindakan hukum (yuridis) yang dapat mempunyai akibat hukum yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum. Perlu adanya pengaturan berdasarkan hukum untuk mencegah dan menindak pelaksanaan perlindungan anak yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial pada anak yang bersangkutan.
- g. Harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan dan kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Taraf perlindungan anak pada suatu masyarakat atau bangsa merupakan tolok ukur taraf peradaban masyarakat dan bangsa tersebut.
- h. Merupakan suatu bidang pembangunan hukum nasional. Mengabaikan masalah perlindungan anak akan mengganggu pembangunan nasional serta kesejahteraan rakyat maupun anak. Ikut serta dalam pembangunan nasional adalah hak dan kewajiban setiap warga Negara.
- i. Merupakan bidang pelayanan sukarela (*voluntarisme*) yang luas lingkupnya dengan gaya baru (*inovatif, inkonvensional*).

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah : <sup>21</sup>

- a. *Dasar filosofis*, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
- b. *Dasar etis*, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- c. *Dasar yuridis*, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penempatan dasar yuridis ini harus secara *integrative*, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum.

Pelaksanaan perlindungan anak harus memenuhi syarat, antara lain merupakan pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak, harus mempunyai landasan filsafat, etika, dan hukum, secara rasional positif, dapat dipertanggung jawabkan, bermanfaat untuk yang bersangkutan, mengutamakan perspektif kepentingan yang mengatur, tidak bersifat aksidental dan komplementer, tetapi harus dilakukan secara konsisten, mempunyai rencana operasional, memperhatikan unsur-unsur manajemen, melaksanakan respon keadilan yang rasional (bersifat pemulihan), tidak merupakan wadah dan kesempatan orang mencari keuntungan pribadi/kelompok, anak diberikan kesempatan untuk berpartisipasi sesuai dan kondisinya, berdasarkan citra yang tepat mengenai anak manusia, berwawasan permasalahan (*problem oriented*) dan bukan berwawasan

---

<sup>21</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, h. 37.

target, tidak merupakan faktor kriminogen, tidak merupakan faktor viktimogen.<sup>22</sup> Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya. Perlindungan anak secara langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tapi orang lain yang melakukan/terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan anak demikian misalnya dilakukan oleh orang tua yang terlibat atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan, dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang menyediakan sarana mengembangkan diri dan sebagainya, mereka yang terlibat dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana.<sup>23</sup>

## **2. Tanggung jawab perlindungan anak.**

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara. Pasal 20 UU No. 35 tahun 2014 menentukan;

---

<sup>22</sup>Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, h. 37.

<sup>23</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, h. 38.

“Negara, pemertintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban terhadap penyelenggaran perlindungan anak.”<sup>24</sup>

Jadi yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat yang sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga Negara ikut bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak.

Kebahagiaan anak merupakan kebahagiaan bersama, kebahagiaan yang dilindungi adalah kebahagiaan yang melindungi. Tidak ada keresahan pada anak, karena perlindungan anak dilaksanakan dengan baik, anak menjadi sejahtera. Kesejahteraan anak mempunyai pengaruh positif terhadap orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. Koordinasi kerjasama kegiatan perlindungan anak perlu dilakukan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.<sup>25</sup>

Kewajiban dan tanggung jawab Negara dan pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam UU No. 35 tahun 2014 yaitu:<sup>26</sup>

- a. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental (pasal 21);
- b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (pasal 22);

---

<sup>24</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, h. 38.

<sup>25</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, h. 38.

<sup>26</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

- c. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara umum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (pasal 23);
- d. Menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (pasal 24).

### 3. Hukum perlindungan anak.

Dalam masyarakat, setiap orang mempunyai kepentingan sendiri, yang tidak hanya sama, tetapi juga kadang-kadang bertentangan, untuk itu diperlukan aturan hukum demi menata kepentingan tersebut, yang menyangkut kepentingan anak diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak, yang disebut dengan hukum perlindungan anak.

Arif Gosita mengatakan bahwa Hukum Perlindungan Anak adalah hukum (tertulis maupun tidak tertulis ) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.<sup>27</sup> Bisma Siregar mengatakan bahwa Aspek Hukum Perlindungan Anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban.<sup>28</sup>

H. de Bie merumuskan *Kinderrecht* (Aspek Hukum Anak) sebagai keseluruhan ketentuan hukum yang mengenai perlindungan, bimbingan, dan peradilan anak dan remaja, seperti yang diatur dala BW, Hukum Acara perdata , Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Hukum Acara Pidana serta peraturan

---

<sup>27</sup>Arif gosita, dalam Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, h. 43.

<sup>28</sup>Irma Soetyawati Sumitro. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, h.15.

pelakasanaannya.<sup>29</sup> J. E Doek dan Mr. H. MA. Drewes memberi pengertian *jongdrecht* (hukum anak muda ) dalam 2 (dua) pengertian, masing-masing pengertian luas dan pengertian sempit. Dalam pengertian luas adalah segala aturan hidup yang memberi perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang. Dalam pengertian sempit meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam ketentuan hukum perdata (*regels van civiel recht*) ketentuan hukum pidana (*regels van strafrecht*) ketentuan hukum acara (*Procesrechtelijke regels*).<sup>30</sup>

Hukum Perlindungan Anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, Hukum Perlindungan Anak berupa hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, peraturan lain yang menyangkut anak. Perlindungan anak menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.

Bismar siregar mengatakan bahwa:

“Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak samaramata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, social dan budaya”.<sup>31</sup>

Arif Gosita memberikan beberapa rumusan tentang hukum perlindungan anak sebagai berikut:<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup>H. De Bie, dalam Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, h. 43.

<sup>30</sup>. E Doek dan Mr. H. MA, dalam Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, h. 43.

<sup>31</sup>Bismar Siregar, *Hukum Dan Hak-Hak Anak* (Jakarta: Rajawali, 1986), h. 22.

<sup>32</sup>Arif Gosita, dalam Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, h. 44.

- a. Perlindungan anak adalah suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Apabila dilihat menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, hukum perlindungan anak itu beraspek mental, fisik dan sosial (hukum). Ini berarti pemahaman dan penerapannya secara integratif
- b. Hukum Perlindungan Anak adalah suatu hasil interaksi antar pihak-pihak tertentu, akibat ada suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling memengaruhi. Perlu diteliti, dipahami dan dihayati yang terlibat pada eksistensi hukum perlindungan anak tersebut. Selain itu juga diteliti, dipahami dan dihayati gejala yang memengaruhi adanya hukum perlindungan anak tersebut (antara lain individu dan lembaga sosial). Hukum perlindungan anak merupakan suatu permasalahan yang sulit dan rumit
- c. Hukum Perlindungan Anak merupakan suatu tindakan individu yang dipengaruhi unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu, seperti: kepentingan (dapat menjadi motivasi), lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren, pemerintah dan sebagainya), nilai-nilai sosial, norma (hukum, status, peran dan sebagainya). Memahami dan menghayati secara tepat sebab-sebab orang membuat hukum perlindungan anak sebagai suatu tindakan individu (sendiri-sendiri atau bersama-sama), dipahami unsur-unsur sosial tersebut
- d. Hukum Perlindungan Anak dapat menimbulkan permasalahan hukum (yuridis) yang mempunyai akibat hukum, yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum
- e. Hukum Perlindungan Anak tidak dapat melindungi anak, karena hukum hanya merupakan alat atau sarana yang dipakai sebagai dasar atau pedoman orang yang melindungi anak. Jadi yang penting disini adalah para pembuat undang-undang



yang berkaitan dengan perlindungan anak. Sering diajarkan/ditafsirkan salah, bahwa hukum itu dapat melindungi orang. Pemikiran itu membuat orang salah harap pada hukum dan menganggap hukum itu selalu benar, tidak boleh dikoreksi, diperbaharui dan sebagainya

- f. Hukum Perlindungan Anak ada dalam berbagai bidang hukum, karena kepentingan anak ada dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa.

Memperlihatkan berbagai dokumen dan pertemuan internasional, dapat dilihat bahwa kebutuhan terhadap perlunya perlindungan hukum terhadap anak dapat mencakup berbagai bidang/aspek, antara lain:<sup>33</sup>

- a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak.
- b. Perlindungan anak dalam proses peradilan.
- c. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial).
- d. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan.
- e. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperlakukan anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya).
- f. Perlindungan anak-anak jalanan.
- g. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata.
- h. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

---

<sup>33</sup>Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Hukum Bagi Anak*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 2002), h. 25.

### **B. Kewajiban Orang Tua terhadap Anak Menurut Hukum Nasional**

Di dalam hukum dan Undang-Undang, kedudukan seorang anak tentu di lindungi agar hak-hak nya tidak di langgar atau keberadaan mereka di biarkan terlantar oleh orang tuanya. Mengingat pada isi UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, didefinisikan bahwa seorang anak adalah yang belum berusia 18 tahun dan kehidupan nya masih menjadi tanggungan kedua orang tua, terutama ayah sebagai kepala keluarga. Artinya, anak wajib dipelihara oleh orang tuanya dan seluruh biaya hidup mulai dari pakaian sampai pendidikan adalah tanggung jawab Ayah sebagai tulang punggung dan kepala keluarga.<sup>34</sup>

Ada pun kewajiban orang tua kepada anak dijabarkan dalam Pasal 26 ayat 1 UU Perlindungan Anak. Berikut ini beberapa kewajiban ayah atau orang tua terhadap anak:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak-anaknya.
2. Membiayai kebutuhan anak mulai dari pangan, sandang, pendidikan.
3. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
4. Mencegah perkawinan dini pada usia anak-anak.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>Irma Satyawati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 14.

<sup>35</sup>Republik Indonesia, Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Anak*.

**BAB IV**  
**PERLINDUNGAN ANAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA MENURUT**  
**UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 DAN HUKUM ISLAM**

**A. Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Akibat Penelantaran Orang Tua Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**

Berdasarkan *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Undang-Undang yaitu ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan (seperti larangan, hukuman dsb.) yang dibuat oleh pemerintah atau suatu negara yang dipimpin oleh kabinet, disetujui oleh parlemen dan ditandatangani oleh kepala negara.<sup>1</sup>

Perlindungan diminta atau tidak diminta, perlindungan terhadap anak merupakan hak anak. Arti dari perlindungan adalah supaya anak merasa aman dan terlindungi, jika anak telah merasa aman sehingga ia dapat dengan leluasa melakukan penjelajahan atau eksploitasi pada lingkungannya. Perlindungan atau pemeliharaan anak merupakan salah satu usaha yang mengadakan keadaan pada setiap anak sehingga bisa melakukan atau mendapatkan hak dan kewajibannya.<sup>2</sup> Sehingga perlindungan ini merupakan salah satu bentuk adanya keadilan pada masyarakat, melindungi atau memelihara anak ialah melindungi manusia. Berdasarkan hal tersebut sehingga pemeliharaan anak harus diupayakan pada semua bidang kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

Perlindungan atau pemeliharaan terhadap anak dalam suatu masyarakat, bernegara yaitu tolak ukur peradaban masyarakat, bangsa tertentu. Sehingga, untuk pertumbuhan manusia yang seutuhnya, sehingga kita harus mengupayakan

---

<sup>1</sup>Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. 111; Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

<sup>2</sup>Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, (Cet. III; Jakarta: PT. Bhuna Ilmu Populart, 2008), h. 246.

perlindungan terhadap anak yang sesuai dengan kemampuan, untuk masa depan nusa dan bangsa. Aktivitas pemeliharaan anak ialah suatu tindakan hukum yang membawa dampak hukum. Karena itu wajib adanya jaminan hukum terhadap aktivitas perlindungan atau pemeliharaan anak tersebut.

Kejelasan hukumnya harus diupayakan agar keberlangsungan aktivitas perlindungan anak<sup>3</sup> dan menghalau atau memerangi penyimpangan yang berdampak negatif, yang tidak diharapkan pada pelaksanaan aktivitas terhadap perlindungan anak. Kejelasan hukum tersebut adalah Undang-Undang No 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang tersebut aturan hukum tentang perlindungan anak sangatlah lengkap yaitu pada BAB IV tentang kewajiban dan tanggung jawab, baik oleh negara, masyarakat, orang tua, dimulai dari pasal 20-25, yaitu:<sup>4</sup>

#### Pasal 20

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.

#### Pasal 21

(1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.

---

<sup>3</sup>Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, h. 246.

<sup>4</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 20-25.

- (2) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.
- (3) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (4) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.
- (5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.

#### Pasal 22

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

#### Pasal 23

- (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
- (2) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.

#### Pasal 24

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak.

#### Pasal 25

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak.

Timbulnya penelantaran anak dan juga pengabaian hak-hak dan kewajiban anak yang menjadi korban merupakan suatu penandamunculnya tumpangtindih dalam tanggung jawab wargamasyarakat seperti ini, manusia tidak dilindungi dengan baik.<sup>5</sup> Penelantaran anak pada konteks hukum Indonesia sangatlah tidak dibenarkan, sebab bertolak dengan aturan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Sebagaimana penjelasan mengenai Hak dan Kewajiban Anak pada beberapa pasal, yaitu sebagai berikut:<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, h. 287.

<sup>6</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

#### Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

#### Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

#### Pasal 6

Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali.

#### Pasal 7

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jasmani sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

#### Pasal 9

- (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

- (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (1) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

#### Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

#### Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri

#### Pasal 12

Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

#### Pasal 13

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan
- a. Diskriminasi
  - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
  - c. Penelantaran



- d. Kekejaman, Kekerasan, dan Penganiayaan
  - e. Ketidakadilan dan
  - f. Perlakuan salah lainnya
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

#### Pasal 14

- (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
- a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
  - b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
  - c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
  - d. Memperoleh Hak Anak lainnya.

#### Pasal 15

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;

- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan; dan
- f. kejahatan seksual.

#### Pasal 16

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

#### Pasal 17

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk
  - a. Mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa
  - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan
  - c. Membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

#### Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

## Pasal 19

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada BAB XA pasal 28A yang berbunyi bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Dan juga pasal 28B ayat (2) yang berbunyi bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>7</sup>

Serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah melampirkan tentang hak anak, tetapi padaimplementasi kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara masih membutuhkan satu Undang-Undang yang lebih jelas sebagai patokan utamauntuk memberikan perlindungan pada anak.<sup>8</sup>

Landasan yuridis pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur tentang sanksi terhadap pelaku yang melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diatur dalam BAB XII mengenai ketentuan pidana, yang berisi 13 Pasal 22 ayat, dimulai dari Pasal 77-90.<sup>9</sup>

<sup>7</sup>UUD1945 dan Amandemennya, Pasal 28, h. 85.

<sup>8</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>9</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Pada kasus terjadinya penelantaran anak yang mana hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar, seperti yang diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 tidak terpenuhi disebabkan kelalaian, kurang mengertinya orang tua, atau bahkan sebab kesengajaan, sanksinya dengan tegas dan jelas diatur pada Pasal 77 ayat (b) dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun penjara dan / atau denda paling banyak 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sebagaimana bunyi pasal tersebut:<sup>10</sup>

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B (Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Hukum yang tidak ditegakkan adalah suatu pelanggaran hukum sebagai norma atau aturan umum, yang sesungguhnya bertujuan untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia.

#### **B. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Konsep Perlindungan Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Akibat Penelantaran Orang Tua***

Dewasa ini persoalan anak kian kompleks. Segmentasi masalah anak juga beragam, mulai anak korban kekerasan, anak yang diperdagangkan, anak yang dipekerjakan, dieksploitasi, sampai anak yang harus menghadapi nasib perih karena mereka tak *save* menghadapi seorang guru yang galak dan keras kepala di tempat belajar. Ironisnya, sampai saat ini empati semua komponen masyarakat untuk ikut serta menangani masalah anak dapat dihitungkan jari. Peran ormas-keagamaan juga

---

<sup>10</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

belum optimal, atau bahkan belum menjadi prioritas, tenggelam dibandingkan respon mereka dengan isu-isu sosial-politik lainnya.<sup>11</sup>

Dalam Islam banyak ayat atau hadits yang menjelaskan pentingnya perlindungan anak. Namun secara institusional belum menjadi simpul yang menggerakkan perlindungan anak secara massif. Misalnya, zakat, dan lembaga sedekah lainnya tidak berfungsi secara maksimal kecuali sifatnya ritual dan karikatif.

Dalam QS Al-Maa'un /107:1-7 Allah swt. berfirman:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا تَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٣﴾ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٧﴾

Terjemahnya:

Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, orang-orang yang berbuat riya, dan enggan (menolong dengan) barang berguna. (sebagian mufassirin mengartikan: enggan membayar zakat).<sup>12</sup>

Ayat ini menggambarkan kewajiban untuk memberikan perlindungan pada anak. Maka bagi mereka yang memiliki kemampuan, atau harta kekayaan berkewajiban memberikan sesuatu yang terbaik untuk kesejahteraan anak, bukan memberikan sesuatu barang yang tidak berguna bagi pemiliknya, misalnya baju bekas.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Abdul Rahman Kanang., *Anak Berkonflik Dengan Hukum (Upaya perlindungan hukum Dan Pemenuhan Hak-Hak konstitusionalnya)*, (Makassar: Alauddin Press University, 2014), h.108.

<sup>12</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 1187.

<sup>13</sup> Syekh Khalid Abdurrahman, *Cara Islam Mendidik Anak* (Jogjakarta: Ad-Dawa'2006), h.111.

Sebagaimana dalam QS Asy-Syu'ara' /26:49-50 yang berbunyi:

قَالَ ءَامَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَا قُطْعَنَ أَيَدِيكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ مِّنْ خَلْفٍ وَلَا صَلْبَكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٩﴾ قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿٥٠﴾

Terjemahnya:

Fir'aun berkata: "Apakah kamu sekalian beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya Dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka kamu nanti pasti benar-benar akan mengetahui (akibat perbuatanmu); Sesungguhnya aku akan memotong tanganmu dan kakimu dengan bersilangan dan aku akan menyalibmu semuanya". mereka berkata: "tidak ada kemudharatan (bagi kami); Sesungguhnya Kami akan kembali kepada Tuhan Kami."<sup>14</sup>

Pada ayat ini, Allah SWT sengaja mendahulukan anak-anak perempuan dari pada anak laki-laki, padahal pada umumnya kedua orang tua lebih menyukai anak laki-laki. Hal ini untuk menunjukkan, bahwa penentuan jenis kelamin anak yang akan dilahirkan merupakan hak prerogratif Allah SWT. Oleh karena itu, Dia mendahulukan apa yang dikehendaki-Nya bukan apa yang dikehendaki orang tua.

Anak adalah amanat dari Allah SWT. Ia berhak hidup sejahtera dan bahagia lahir dan batin, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, orang tua berkewajiban memelihara kesehatan dan pertumbuhan fisik, mengembangkan bakat dan kemampuan serta membimbing rohaniah anak sesuai dengan ajaran Islam.<sup>15</sup>

Menurut ajaran Islam, kewajiban orang tua terhadap anak, antara lain adalah:

### 1. Memberikan nama yang baik.

Nama yang diberikan kepada anak sangat menentukan kehormatannya di masa depan nanti. Pada hari ketujuh kelahiran anak, orang tua

<sup>14</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 369.

<sup>15</sup>Syekh Khalid Abdurrahman, *Cara Islam Mendidik Anak* (Jogjakarta: Ad-Dawa; 2006), h.125.

sunnahmenyelenggarakan acara Walimatu al-Tasmiyah (upacara atau selamat pemberian nama). Hal ini sunnah dilaksanakan sebagai ucapan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah menganugrahkan anak kepada mereka. Acara ini juga merupakan sebagian dari ajaran Islam yang sudah menjadi tradisi dalam masyarakat Islam, khususnya di Indonesia. Sebagaimana telah disabdakan Rasulullah SAW dalam hadits shahih yang diriwayatkan oleh ashab al-Sunan (Imam Abu Dawud, al-Tirmidzi, al-Nasa'i dan Ibnu Majah) dari sahabat Samurah RA. yang artinya: "Setiap anak tergadai oleh 'aqiqah yang disembelih untuknya pada hari ketujuh kelahirannya, diberi nama dan dipotong rambutnya".<sup>16</sup>

Sebagaimana tradisi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang menganut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bidang aqidah dan mengikuti salah satu dari Madzahib al-Arba'ah (Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) dalam bidang fiqh, maka pada acara Walimatu al-Tasmiyah biasanya diisi dengan membacakan Rawi atau Dziba' yang mengisahkan riwayat hidup Nabi Muhammad SAW, lengkap dengan sifat-sifat terpujinya dan sejarah perjuangannya. Ketika bacaan Rawi atau Dziba' telah sampai pada mahal al-qiyam, maka para hadirin pun berdiri dan sang bayi dibawa masuk ke dalam ruang acara serta diedarkan di hadapan para hadirin untuk dimohonkan do'a, khususnya kepada para ulama dan orang-orang yang shalih, lalu digunting rambutnya dan mulutnya diberi madu atau kurma yang telah dihaluskan (tahnik al-maulud bi al-tamrah).

## **2. Memberikan kasih sayang yang tulus.**

Orang tua berkewajiban memberikan kasih sayang yang tulus kepada anak-anaknya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan.

---

<sup>16</sup>Mohammad Nur Abdul Hafid, *Mendidik Anak Bidang Akidah Dan Ibadah*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), h. 17.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka agama Islam mewajibkan semua orang tua memberikan kasih sayang yang tulus dan memadahi kepada anak-anaknya. Sebagaimana telah disabdakan Rasulullah SAW dalam hadits shahih yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Ahmad ibn Hambal dari sahabat Abdullah ibn Abbas RA. yang artinya: “Tidak termasuk umatku (yang baik), seseorang yang tidak sayang kepada anak kecil dan tidak menghormati orang tua”.<sup>17</sup>

### **3. Memperlakukan anak-anak dengan adil.**

Perlakuan yang adil harus tercermin dalam seluruh sikap dan perilaku orang tua terhadap anak-anaknya, baik dalam memberikan kasih sayang, memberikan nafkah maupun dalam memberikan kesempatan meraih cita-cita dan prestasi. Tradisi masyarakat yang lebih memberikan kesempatan kepada anak laki-laki dibanding anak perempuan adalah salah dan bertentangan dengan agama Islam. Islam adalah agama yang memberikan hak-hak yang sama antara anak laki-laki dan perempuan.

Mereka sama-sama berhak memperoleh kasih sayang, nafkah dan pendidikan dari orang tuanya. Sehubungan dengan hal ini, maka ketika masyarakat Arab jahiliyah bersikap diskriminatif terhadap anak-anak perempuan, Allah SWT justru memberikan perempuan kepada Rasulullah SAW dan diberi nama Fatimah al-Zahra. Dan hanya dari Fatimah al-Zahra inilah Rasulullah SAW mendapatkan cucu serta cicit yang berkembang luas hingga sekarang. Hal ini memberikan pesan kepada seluruh manusia khususnya umat Islam, bahwa mempunyai anak perempuan bukanlah suatu kehinaan, dan bahwa anak perempuan tidak lebih rendah dibanding dengan anak laki-laki.

---

<sup>17</sup>Mohammad Nur Abdul Hafid, *Mendidik Anak Bidang Akidah Dan Ibadah*, h. 17



Orang tua tidak boleh bersikap diskriminatif terhadap anak-anaknya, walaupun hanya dalam masalah memberikan ciuman kasih sayang. Suatu ketika Rasulullah SAW melihat seorang pria yang mempunyai dua orang anak. Kemudian sang ayah hanya mencium salah seorang diantara kedua anaknya tersebut. Melihat hal itu, Rasul langsung menegurnya dengan ucapan *fahalla sawaita bainahuma?* (kenapa engkau tidak memberikan ciuman yang sama kepada keduanya?). Kalau dalam masalah memberikan ciuman kasih sayang kepada anak-anak saja harus adil, apalagi dalam masalah nafkah dan pendidikan.

Oleh karena itu, orang tua harus selalu berusaha berlaku adil kepada anak-anaknya dalam seluruh aspek kehidupan, sehingga mereka hidup dengan tenang dan damai. Jika orang tua tidak berlaku adil kepada anak-anaknya, maka perasaan mereka akan sakit sehingga dalam diri mereka akan tumbuh dan berkembang sikap iri hati (*hasad*), kebencian dan bahkan permusuhan antara satu dengan lainnya.

#### **4. Memberikan nafkah yang memadai sesuai kebutuhan anak.**

Orang tua berkewajiban memberi nafkah yang memadai sesuai dengan kebutuhan anak, baik berupa makanan, minuman, pakaian, maupun yang lainnya, yang diperlukan untuk membantu pertumbuhan fisik dan pemeliharaan kesehatan mereka. Nafkah tersebut diberikan orang tua kepada anak-anaknya sejak lahir hingga memasuki usia baligh. Oleh karena itu, para ibu berkewajiban memberikan air susu ibu (ASI) kepada anak-anaknya sejak mereka lahir hingga berusia dua tahun.<sup>18</sup>

Selain memberikan air susu ibu (ASI), orang tua juga berkewajiban memberikan makanan, minuman, pakaian dan sebagainya yang diperlukan anak-anak sesuai dengan pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa mereka.

---

<sup>18</sup>Mohammad Nur Abdul Hafid, *Mendidik Anak Bidang Akidah Dan Ibadah*, h.18.

Hal ini dimaksudkan agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat serta terhindar dari berbagai penyakit yang menyebabkan lemahnya fisik, akal pikiran, kecerdasan, emosi, dan spiritual.

Sebagaimana telah diingatkan Allah SWT dalam QS An-Nisa/4:9 yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Terjemahnya:

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.<sup>19</sup>

### 5. Menanamkan ajaran agama Islam sejak usia dini.

Para orang tua berkewajiban untuk menanamkan ajaran-ajaran agama Islam kepada anak-anaknya sejak usia dini, agar mereka tumbuh dan berkembang menjadi anak yang shaleh dan shalehah, serta mampu menjadi *qurrota a'yun* (penenang jiwa dan penyejuk hati) bagi kedua orang tuanya. Hal itu harus dilakukan sejak anak lahir dengan mengumandangkan adzan dan iqomat di kedua telinganya dengan tujuan agar suara yang terdengar dan terekam oleh anak adalah kalimat-kalimat tauhid. Kemudian diikuti dengan pemberian nama yang islami dan diberikan contoh teladan yang baik sesuai dengan perkembangan jiwa anak.<sup>20</sup>

Pada dasarnya setiap anak membawa potensi memeluk agama Islam dan mengamalkan ajaran-ajarannya. Potensi tersebut dapat berkembang dengan baik, jika anak mendapat bimbingan dari kedua orang tuanya. Sebaliknya, potensi itu menjadi

<sup>19</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 78.

<sup>20</sup>Mohammad Nur Abdul Hafid, *Mendidik Anak Bidang Akidah Dan Ibadah*, h. 19.

tidak berkembang, bahkan hilang sama sekali jika anak-anak tidak dibimbing ajaran Islam oleh orang tua atau lingkungannya. Karena setiap anak lahir dalam keadaan fitrah (suci dan membawa potensi agama Islam). Maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan mereka Yahudi, atau Nasrani, atau Majusi.

Dengan memberikan bimbingan agama kepada anak-anak sejak usia dini, maka diharapkan mereka memiliki rohani yang bersih dan suci sehingga selalu terdorong untuk melaksanakan seluruh perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-laranganNya. Dengan demikian, insya Allah mereka akan selalu disinari cahaya Islam sehingga akan meraih kebahagiaan hidup yang hakiki, baik di dunia maupun di akhirat serta terhindar dari kesengsaraan, kesesatan dan siksa api neraka.

#### **6. Memberikan pendidikan yang baik sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya.**

Agar anak-anak tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga menjadi anak-anak yang shaleh dan shalehah serta hidup berbahagia di dunia dan di akhirat, maka orang tua berkewajiban mendidik mereka sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam yang telah diajarkan Allah dan Rasul-Nya.<sup>21</sup>

Menurut ajaran Islam, seseorang disebut shalih dan shalihah jika ia melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah SWT serta kepada semua umat manusia. Sehubungan dengan itu maka orang tua berkewajiban mendidik anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan agar mereka mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah SWT serta kepada sesama manusia. Kesesuaian antara cara mendidik orang tua dan bakat, minat, kemampuan serta tuntutan zaman yang sedang dan atau akan dihadapi oleh anak-anaknya sangatlah

---

<sup>21</sup>Mohammad Nur Abdul Hafid, *Mendidik Anak Bidang Akidah Dan Ibadah*, h.19.

penting. Oleh karena itu, orang tua tidak boleh memaksakan pola pendidikan yang diterimanya pada masa dahulu dalam mendidik anak-anaknya pada masa sekarang. Demi relevannya pola pendidikan dengan keadaan zaman yang dialami oleh anak-anaknya sekarang. Sehubungan dengan hal itu Rasulullah SAW menegaskan dalam hadits yang artinya: “Didiklah anak-anakmu (sesuai dengan bakat, minat, kemampuan serta tuntutan zaman dimana mereka hidup), karena mereka diciptakan untuk hidup pada sesuatu zaman yang berbeda dengan zaman kamu sekalian”.

Salah satunya adalah dengan cara menanamkan iman yang mantap dalam jiwa mereka serta membiasakannya untuk mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam dan berhias diri dengan al-Akhlak al-Karimah. Orang tua juga harus memperkenalkan anak-anaknya terhadap realitas kehidupan berdasarkan kemampuan daya pikir mereka, bagaimana menjalani kehidupan dengan berdasarkan syari’at agama Islam.

Berdasarkan penjelasan diatas, meskipunpun secara akurat sangat jelas jika pemeliharaan (perlindungan) anak adalah tugas dan tanggung jawab orang tua yang semestinya terpenuhi sesuai dengan kemampuannya. Sebab kegagalan pemeliharaan atau penelantaran anak untuk membekali kebutuhannya, khususnya berbekal ilmu agama, tidak hanya berdampak pada diri si anak yang bersangkutan, tetapi juga pada kedua orang tuanya pun akan merasakan kerugian yang tidak kecil, sebab kelak di akhirat mereka (orang tua) akan dituntut untuk mempertanggung jawabkannya. Sebab dalam hukum Islam mempunyai 2 dimensi hukuman terhadap para pelaku kejahatan, yaitu sanksi dunia dan sanksi akhirat.

Islam tidak menetapkan secara rinci dan tegas sanksi yang akan dikenakan kepada setiap pelanggar jarimah ta’zir, dimana jarimah ta’zir merupakan hukuman yang berupa memberi pelajaran untuk mencegah pelaku kejahatan untuk kembali

berbuat kejahatan atau dengan kata lain membuatnya jera. Islam hanya menjelaskan beberapa hukuman yang bisa digunakan persis dengan tujuan yang dikehendaki. Karena itu, penentuan sanksi yang tepat dengan tindak pidana yang dilakukan, diberikannya seutuhnya untuk kebijaksanaan penguasa atau hakim.

Namun pihak penguasa atau hakim tidak dibenarkan menyelewengkan pendelegasian kewenangan untuk menentukan suatu sanksi bagi jarimah ta'zir. Pada saat menentukan suatu sanksi kepada jarimah ta'zir, pihak penguasa atau hakim semestinya selalu didasarkan pada kondisi dan keadaan terpidana, lingkungan yang mengelilingi terpidana, keuntungan warga masyarakat yang menginginkan, dan mengarah pada tujuan sanksi yang dikehendaki dalam Islam, yaitu menjaga dan melindungi seseorang dan berhentinya seseorang dari perilaku tindak pidana.

Macam-macam sanksi dalam jarimah ta'zir berdasarkan ulama fiqh, dapat berupa sanksi yang paling ringan, seperti menegur mencela atau mempermalukan terpidana dan dapat pula berupa sanksi yang paling berat misalnya sanksi hukuman mati. Sanksi tersebut ada yang bersifat jasmani misalnya pemukulan atau siksaan. Ada pula yang bersifat rohani misalnya teguran, gertakan atau cacian, ada juga yang bersifat jasmani sekaligus rohani misalnya sanksi penahanan atau sanksi penjara. Ada juga sanksi yang bersifat materi misalnya sanksi denda.

Menurut Ahmad Wardi Muslich sanksi atau hukuman ta'zir itu bermacam-macam, tetapi secara umum bisa digolongkan dalam 4 (empat) golongan,<sup>22</sup> yaitu sebagai berikut:

- a. Sanksi ta'zir yang mengenai tubuh, misalnya sanksi berupa hukuman mati dan siksaan.

---

<sup>22</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Cet: II; Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 294.

- b. Sanksi ta'zir yang berhubungan dengan kemerdekaan seseorang, misalnya sanksi penjara dan pengasingan.
- c. Sanksi ta'zir yang hubungan dengan materi, misalnya denda, penyitaan/perampasan harta dan penghancuran barang.
- d. Sanksi-sanksi lain yang ditetapkan oleh pemerintah demi kemaslahatan umum.

Berdasarkan penjelasan diatas kita dapat menyimpulkan bahwa, meskipun ta'zirsifatnya diserahkan kepada kebijakan hakim, tidak diartikan dengan jelas, dan tidak juga dibahas dengan rinci, tetapi bisa disimpulkan jika segala perilaku yang melanggar kepentingan pribadi atau masyarakat yang bersifat umum, yang terdampak ta'zir. Wewenang publiklah yang menetapkan aturan sanksinya dengan semangat syariah.

Dalam hukum Islam, dasar hukum yang mengatur mengenai hukuman bagi pelaku penelantaran anak tidak bisa ditemukan secara jelas oleh syara'. Walaupun demikian, tidak berarti pelaku penelantaran anak bisa bebas dari hukuman atas perilakunya. Para pelaku penelantaran anak bisa dikenakan sanksi ta'zir, sebab ta'zir merupakan suatu istilah untuk sanksi atas sanksi-sanksi yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'.

Adapun pengimplementasian sanksi ta'zir ini yaitu mutlak menjadi hak dan wewenang kepala Negara (imam), misalnya hakim dan petugas hukum yang lainnya. Jika dilakukan oleh orang lain yang tidak memiliki hak/tugas melakukannya, maka dia bisa dikenakan hukuman. Alasannya segala sanksi itu dilakukan berorientasi untuk melindungi warga masyarakat atau rakyat, oleh sebab kepala Negara itu wakil rakyat sehingga hanya dia yang berwenang melaksanakan sanksi ta'zir ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 pada Pasal 1 ayat 1 dimana dalam memberikan perlindungan bagi anak melingkupi seseorang yang belum berusia 1 tahun dan belum kawin termasuk juga anak yang masih dalam kandungan ibunya. Kasus penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua kandung kepada anaknya sendiri apabila dipandang dari sisi hukumnya yaitu perilaku yang dikategorikan kedalam tindak pidana. Sikap tak acuh orang tua menyebabkan keterlantaran, hal tersebut dapat berdampak dan memberi pengaruh besar serta menghambat perkembangan fisik, mental, emosional juga sosial anak pada masa yang akan datang. Anak semestinya dilindungi supaya terhindar dari berbagai macam perilaku kejahatan, misalnya perilaku penelantaran yang dilakukan oleh orang tuanya.
2. Bentuk perilaku penelantaran anak apapun alasannya dalam hukum islam tidak pernah dibenarkan sebab para pelaku penelantaran anak baik yang disengaja atau tidak disengaja, mereka telah mengabaikan hak-hak anak tersebut. Kemudian hukuman atau sanksi yang ada didalam hukum islam untuk para pelaku penelantaran anak itu sangat bervariasi mulai dari yang paling berat sampai yang paling ringan, sebab pada hukum islam hukuman untuk para pelaku penelantaran anak tergolong dalam kategori jarimah ta'zir, yang paling berat atau paling ringannya hukuman tersebut diserahkan kepada penguasa atau hakim setempat.

## **B. Implikasi Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka implikasi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan agar dapat memahami dan menyebarluaskan maksud dan pemikiran tentang keadilan, hak dan kewajiban, kepentingan pribadi, kepentingan umum dan maksud lainnya yang baik yang memiliki hubungan dengan pelaksanaan perlindungan anak dengan cara melakukan sosialisasi kemasyarakatan.
2. Penelitian ini diharapkan agar semua warga masyarakat terutama orang tua meningkatkan pemahaman dan kesadaran pada hak-hak anak dan perlindungan anak dan juga perlu mengetahui bahwasanya kekerasan pada anak tidak hanya terjadi pada anak yang teraniaya secara fisik, tapi juga termasuk pengertian kekerasan pada anak sangat luas.
3. Penelitian ini diharapkan agar dengan dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 mengenai perlindungan anak dan juga dampak pidananya atau sanksinya yang memiliki tujuan untuk melindungi anak yang bisa disalurkan melalui sosialisasi ke sekolah ataupun tempat pengajian umum dan lainnya.
4. Penelitian ini diharapkan supaya aparat penegak hukum segera meningkatkan tugasnya untuk menindak tegas para pelaku penelantaran anak sebagai efek jera.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurrahman, Syekh Khalid. *Cara Islam Mendidik Anak*. Jogjakarta: Ad Dawa. 2006.
- Ahmad, Rotiq. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1997.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Rajawali. 2011.
- Arief, Barda Nawawi. *Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Bandung: ghalia Indonesia, 2002.
- Atmasasmita, Romli. *Problema Kenakalan Anak Dan Remaja*. Bandung: Amrico, 1984.
- Bie H. De. Dalam Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. 2008.
- Darajat, Zakiyah. *Kesehatan Mental*. Jakarta: Inti Idayu Press. 1983.
- Djamil, Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. 2008.
- \_\_\_\_\_. *Aspek Hukum Pencatatan Kelahiran Dalam Usaha Perlindungan Anak*. Bandung: PT Refika Aditama. 2008.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*. Cet.III; Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populart. 2008.
- Gosita, Arif. dalam Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. 2008.
- Hadikusuma, Hilman *Hukum Adat Dalam Yurisprudensi* (Bandung: Citra Aditya Bakti. 1993.
- Hafid, Mohammad Nur Abdul. *Mendidik Anak Bidang Akidah Dan Ibadah*. Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Howe, David. *Empati Makna dan Pentingnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Kanang, Abdul Rahman. *Anak Berkonflik Dengan Hukum (Upaya perlindungan hukum Dan Pemenuhan hak-Hak konstitusionalnya)*, Makassar. Alauddin University Press. 2011.

- \_\_\_\_\_. *Hukum dan Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seks Komersial (Perspektif Hukum Nasional dan Internasional)*, Makassar. Alauddin Press, 2014.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia. 2012.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cet. 111*; Jakarta: Balai Pustaka. 2005.
- Prodjokiriono, Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur. 1981.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak..
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Siregar, Bismar. *Hukum Dan Hak-Hak Anak*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Slamet, Yulius. *Metode penelitian Sosial*. Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2006.
- Soemitro, Irma Satyawati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Soetedjo, Wagita dan Melani. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama, 2013.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010.
- Suyanto, Bagong *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Suriasumantri dan Irawan Seoharaton, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 1999.
- Sukmadinata dan Saifuddin Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2011.

*Undang-Undang Peradilan Anak*. Jakarta: Redaksi Sinar Grafika. 2009.

Wadong, Maulana Hasan. *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. 2000.

### **Skripsi**

Ratomi, Achmad. *Penyelesaian Anak yang Berkonflik Dengan Hukum dalam Konteks Sosial Masyarakat (Penghindaran Labeling Terhadap Anak)*, *Skripsi Online*. Kalimantan: Fak.Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. 2013.

Maryandani, Ayu Nadia. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Penelantaran oleh Orangtua Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia*. *Skripsi Online*. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung. 2016.

### **Website**

<http://id.wikipedia.org/wiki/konflik>, diakses pada tanggal 11 November 2017.

<http://torehanjalanan.wordpress.com/2012/4/14/anak-jalanan/>, (Diakses pada 6 November 2016).

<http://torehanjalanan.wordpress.com/2012/4/14/anak-jalanan/>, 6 November.

<https://media.neliti.com/media/publications/147255-ID-aspek-hukum-perlindungan-anak-dalam-pers.pdf>.

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=525168danval=10730dantitle=PRINSIPPRINSIP%20DASAR%20TENTANG%20HAK%20PERLINDUNGAN%20ANAK>.

<https://media.neliti.com/media/publications/58484-ID-perlindungan-hak-anak-dalam-perspektif-p.pdf>

<https://media.neliti.com/media/publications/177740-ID-perlindungan-anak-dalam-perspektif-islam.pdf> muh. zaki.

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42362/1/AHMAD%20ROS%20YADI-FSH.pdf>.



# LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa  
Telp. 811879 Fax 8221430

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Nomor : Tahun 2018 1639

TENTANG

PANITIA, PEMBIMBING DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR PROPOSAL/SKRIPSI  
TAHUN 2018

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

Membaca : Surat Pemohonan  
Nama : Jusnaidar  
NIM : 10200114125  
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan  
Hari/Tanggal : Kamis, 26 Juli 2018  
Pihak : Ujian Seminar Proposal/Skripsi  
Judul : "Tinjauan Psikologis Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Akibat Penelantaran Oleh Orang Tua"

Menimbang : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Proposal/Skripsi;  
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;  
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk disertai tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;  
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
6. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Seminar Proposal/Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :

Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag  
Sekretaris : Dr. Kurniati, M.H.I  
Penguji I : Dr. Duding Abdullah, M.Ag  
Penguji II : Awaliah Musgamy, S.Ag., M.Ag  
Pelaksana : 1. Dra. Andi Masniah  
2. Nursyamsi, S.T

Kedua : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Seminar Proposal/Skripsi  
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2018;  
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.  
Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di : Samata Gowa  
Pada tanggal : Juli 2018

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.  
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan :

Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa;





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus I : Jl. St. Alauddin No.63, Tlp. (0411) 864924 Fax (0411) 864924 Makassar  
Kampus II. Jl.H.M.Yasin Limpo No.36 Samata-Gowa Telp. 841879 Fax 8221400

Samata Gowa, 23 Juli 2018

Nomor : B- 1634/SH.O1/PP.00.9/07/2018  
Sifat : Penting  
Hal : Undangan Ujian Seminar Proposal

Kepada Yth :

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. | (Ketua )        |
| 2. Dr. Kurniati, M.H.I.                   | (Sekretaris)    |
| 3. Dr. Dudung Abdullah, M.Ag              | (Penguji I)     |
| 4. Awaliyah Musgamy, S.Ag., M.Ag          | (Penguji II)    |
| 5. Abd. Rahman, M.Pd., Ph.D               | (Pembimbing I)  |
| 6. Hj. Rahmiati, S.Pd., M.Pd              | (Pembimbing II) |
| 7. Pelaksana.                             |                 |

di

Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Seminar Proposal/Skripsi atas nama :

Nama : Jusnaidar  
NIM : 10200114125  
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang kepada Bapak/Ibu, Saudara/(i) untuk menghadiri Ujian Seminar Proposal/Skripsi, Insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 26 Juli 2018  
Waktu : Pukul 09.00- 10.00 Wita  
Tempat : Ruang Jurusan HPK

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.  
NIP. 19621016 139003 1 003

Tembusan:

- Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa;

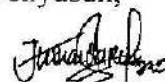
**PENGESAHAN DRAFT SKRIPSI**

Nomor: 3135/HPK/2018

Judul Skripsi: Perlindungan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Akibat Penelantaran Oleh Orangtua (Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam)

Gowa, 1 Oktober 2018

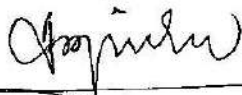
Penyusun,



JUSNAIDAR

Nim. I0200114125

Pembimbing I



Abdul Rahman Kanang, M.Pd., Ph. D

Nip. 19731231 200501 1 034

Pembimbing II



Hj. Rahmliati, M.Pd

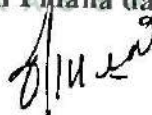
Nip. 19771005 200901 2 005

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**ALAUDDIN**

Diketahui Oleh:

**Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan**



Dra. Nila Sastrawati, M. Si

Nip. 19710712199703 2 002

Disahkan Oleh:

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**

**UIN Alauddin Makassar**



Prof. Dr. Darussalam, M. Ag

Nip. 196210161990031003

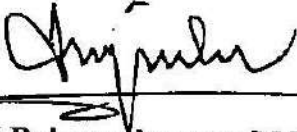
## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **JUSNAIDAR**, NIM: 10200114125, mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, *“Perlindungan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Akibat Penelantaran Oleh Orang Tua (Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam)”*.

Memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang ujian hasil.


Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Pembimbing I

  
Abdul Rahman Kanang, M.Pd., Ph. D.  
Nip. 19731231 200501 1 034

Makassar, 5 Januari 2019

Pembimbing II

  
Hj. Rahmiati, M. Pd.  
Nip. 19771005 200901 2 005





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa  
Telp. 841879 Fax 8221400

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Nomor : Tahun 2019

TENTANG  
PANITIA, PEMBIMBING DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI  
TAHUN 2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

Membaca : Surat Permohonan  
Nama : Jusnaidar  
NIM : 10200114125  
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan  
Hari/Tanggal : Senin, 11 Februari 2019  
Prihal : Ujian Seminar Hasil/Skripsi  
Judul : "Perlindungan Anak yang Berkonflik dengan Hukum Akibat Penelantaran oleh Orang Tua (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)"

Menimbang : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Hasil/Skripsi;  
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;  
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Mahandatangan Surat Keputusan;  
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
6. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pertama : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Seminar Hasil/Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :

Ketua : Prof. Dr. Darussalam, M.Ag  
Sekretaris : Dr. Kumiaty, M.H.I.  
Penguji I : Dr. Dudung Abdullah, M.Ag  
Penguji II : Awaliah Musgamy, S.Ag., M.Ag.  
Pelaksana : 1. Nurhayati Wahid  
2. Nursyamsi, S.T

Kedua : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Seminar Hasil/Skripsi  
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2019;  
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.  
Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Samata Gowa  
Februari 2019

Tembusan :

Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa;

Dr. Darussalam, M.Ag.  
NIP. 19621016 199003 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa  
Telp. 841879 Fax 8221400

Nomor : B- /SH.O1/PP.00.9/02/2019  
Sifat : Penting  
Hal : Undangan Ujian Seminar Hasil

Samata Gowa, Februari 2019

Kepada Yth :

- |                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| 1. Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.      | (Ketua)         |
| 2. Dr. Kurniati, M.H.I.             | (Sekretaris)    |
| 3. Dr. Dudung Abdullah, M.Ag.       | (Penguji I)     |
| 4. Awaliah Musgamy, S.Ag., M.Ag.    | (Penguji II)    |
| 5. Abd. Rahman Karang, M.Pd., Ph.D. | (Pembimbing I)  |
| 6. Hj. Rahmiati, S.Pd., M.Pd.       | (Pembimbing II) |
| 7. Pelaksana                        |                 |

di

Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Seminar Hasil/Skripsi atas nama :

Nama : Jusnaidar  
NIM. : 10200114125  
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang kepada Bapak/Ibu, Saudara/(i) untuk menghadiri Ujian Seminar Hasil/Skripsi, Insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 11 Februari 2019  
Waktu : Pukul 10.00-11.00 Wita  
Tempat : Ruang Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.  
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan:

- Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa;

## PERSETUJUAN PEMBIMBING/PENGUJI

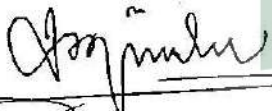
Pembimbing penulisan skripsi saudara JUSNAIDAR NIM: 10200114125, Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul, *"Perlindungan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Akibat Penelantaran Oleh Orang Tua (Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam)"* memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Samata, 12 Februari 2019

Pembimbing I


Pembimbing II

  
Abd. Rahman Kanang, M.Pd., Ph.D.  
NIP. 19731231 200501 1 034

  
Hj. Rahmiati, S.Pd., M.Pd  
NIP. 19771005 200901 2 005

Penguji I

Penguji II

  
Dr. Dudung Abdullah, M.Ag  
NIP. 19540203 198503 1 002

  
Awaliah Musgami, S.Ag., M.Ag  
NIP.19750822 200604 2 002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa  
Telp. 841879 Fax 8221400

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Nomor : 601 Tahun 2019

**T E N T A N G**

**PANITIA DAN PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH/SKRIPSI TAHUN 2019**

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

**Membaca** : Surat Permohonan  
Nama : Jusnaidar  
N I M : 10200114125  
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan  
Hari/Tanggal : Rabu, 27 Februari 2019  
Prihal : Ujian Munaqasyah/Skripsi  
Judul : "Perlindungan Anak yang Berkonflik dengan Hukum Akibat Penelantaran oleh Orang Tua (Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam)"

**Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Hasil/Skripsi;  
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;  
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Keputusan Menteri Agama RI, Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;  
4. Keputusan Menteri Agama RI, Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
5. Peraturan Menteri Agama RI, Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
6. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Munaqasyah/Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut:

Ketua : Prof. Dr. Darussalam, M.Ag  
Sekretaris : Dra. Nila Sastrawati, M.St.  
Penguji I : Dr. Dudung Abdullah, M.Ag  
Penguji II : Awaliah Musgamy, S.Ag., M.Ag.  
Pelaksana : Dra. Hj. Wahida Rahim, M.M

**Kedua** : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Munaqasyah/Skripsi  
**Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2019;  
**Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di Samata Gowa  
Pada tanggal 27 Februari 2019  
Dekan

Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.  
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan :

Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa; (Sebagai Laporan)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa  
Telp. 841879 Fax 8221400

Nomor : B- 912 /SH.O1/PP.00.9/02/2019  
Sifat : Penting  
Hal : Undangan Ujian Munaqasyah/Skripsi

Samata Gowa, Februari 2019

**Kepada Yth :**

- |                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| 1. Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.      | (Ketua )        |
| 2. Dra. Nila Sastrawati, M.Si.      | (Sekertaris)    |
| 3. Dr. Dudung Abdullah, M.Ag        | (Penguji I)     |
| 4. Awaliah Musgamy, S.Ag., M.Ag.    | (Penguji II)    |
| 5. Abd. Rahman Kanang, M.Pd., Ph.D. | (Pembimbing I)  |
| 6. Hj. Rahmiati, S.Pd., M.Pd.       | (Pembimbing II) |
| 7. Pelaksana.                       |                 |

di

Tempat

*Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Munaqasyah/Skripsi atas nama :

Nama : Jusnaidar  
NIM : 10200114125  
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang kepada Bapak/Ibu, Saudara/(i) pada Ujian Munaqasyah/Skripsi, Insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 27 Februari 2019  
Buka Sidang : 08.30 Wita  
Waktu : Pukul 11.00-12.00 Wita  
Tempat : Ruang Ujian Munaqasyah

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalam  
Dekan  
  
Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.  
NIP. 19621016 199003 1 003

## RIWAYAT HIDUP



Jusnaidar, lahir di Enrekang Kecamatan Alla' Kabupaten Enrekang, pada tanggal 25 November 1995. Anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Udin Sanaria (Alm) dengan Ibu Ernawati. Penulis memulai pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri 90 To'cempa Kecamatan Alla' Kabupaten Enrekang.

Pada tahun 2008, penulis menempuh pendidikan di SMP Negeri 3 Alla' lulus pada tahun 2011, dengan tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 1 Alla' (SMA Model 3 Enrekang) dan lulus pada tahun 2014. Pada tahun 2014, penulis melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar melalui Jalur Ujian Masuk Mandiri (UMM) dan lulus di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan hingga tahun 2019.

